



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**Direktorat Pemberdayaan Usaha
Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 14 Januari 2026

Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2025 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis dalam meningkatkan investasi kelautan dan perikanan dan meningkatkan UMKM Pengolah produk kelautan dan perikanan naik kelas. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan pada tingkat kementerian, pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha guna memastikan keselarasan antara sasaran, indikator kinerja, dan kebijakan strategis yang ditetapkan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja.

Dari 8 indikator kinerja telah dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025, dengan hasil pengukuran tersebut ke-7 indikator kinerja telah mencapai target tahun 2025, hanya indikator kinerja nilai investasi kelautan dan perikanan yang secara prognosa diperkirakan hanya terealisasi sebesar 82,60%. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 106,47%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dari 8 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 3 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 4 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (2) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (3) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (4) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.
3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 3 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (2) Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya, (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja tahun 2025 adalah (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp 10,83 Triliun atau dengan kata lain tercapai 82,60% dari target tahun 2025 (2) Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya telah terealisasi sebesar 6,49% atau tercapai 120% dari target tahun 2025; (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 100% atau dengan kata lain tercapai 105,26% dari target tahun 2025; (4) Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 100% atau dengan kata lain tercapai 100% dari target tahun 2025; (5) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 86,69% atau dengan kata lain tercapai 115,59% dari target tahun 2025; (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 86,70% atau dengan kata lain tercapai 100,81% dari target tahun 2025; (7) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 2 inovasi atau dengan kata lain tercapai 200% dari target tahun 2025 dan (8) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan

Direktorat Pemberdayaan Usaha, teralisasi sebesar 89,52 atau dengan kata lain tercapai 110,52% dari target tahun 2025.

Pada Tahun 2025, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar Rp 12.619.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp 10.796.253.000,- ,sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp1.822.747.000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.822.498.624,- atau setara dengan 99,98% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama Tahun 2025, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama	6
1.6. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.1.1 Visi.....	9
2.1.2 Misi	10
2.1.3 Tujuan.....	11
2.1.4 Sasaran	12
2.1.5 Kebijakan	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja	23
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
3.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan	24
IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan	24
3.2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	37
IK2. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkatkan Omsetnya	37
3.2.3 Sasaran Strategis 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	75
IK3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	75
IK4. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	76
IK5. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha.....	77
IK6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha...	79
IK7. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	82
IK8. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	83
BAB IV. PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Rekomendasi.....	87
4.3 Tindak Lanjut	87
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	20
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	21
Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	24
Tabel 4. Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran Tahun 2025.....	36
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan III Tahun 2025.....	38
Tabel 6. Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	40
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan IV 2025	42
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang Ditingkatkan kapasitasnya) Triwulan IV 2025	42
Tabel 9. Topik Pelatihan	51
Tabel 10. Kinerja koperasi sektor kelautan dan perikanan.....	52
Tabel 11. Tabel Potensi Kemitraan	62
Tabel 12. Hasil Fasilitasi	67
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2025.....	75
Tabel 14. Capaian Penyelesaian Temuan BPK pada Tahun 2025.....	77
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	77
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pemasaran pada Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	80
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2025.....	83
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2025	84
Tabel 19. Tabel Tindak lanjut yang Telah Dilaksanakan Pada Triwulan III 2025.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	4
Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan.....	5
Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	5
Gambar 4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan	6
Gambar 5. Visi Indonesia Emas 2045.....	9
Gambar 6. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	23
Gambar 7. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sumber Permodalan Triwulan III 2024 - 2025.....	26
Gambar 8. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara (Top 3), Lokasi Tujuan dan Bidang Usaha Periode Triwulan III Tahun 2025	26
Gambar 9. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan	28
Gambar 10. Investment and Business Matching 2025.....	30
Gambar 11. Pendampingan Investasi PT Indodana Brata Integritas.....	31
Gambar 12. Pendampingan Investasi PT Bhawana Sигра Caraka.....	32
Gambar 13. Pendampingan Investasi PT Oceva Indonesia Nusantara	33
Gambar 14. Pendampingan Rencana Investasi PT Seasix Energy Indonesia.....	33
Gambar 15. Pendampingan Rencana Investasi PT Panen Laut Lestari	34
Gambar 16. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan	35
Gambar 17. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan	37
Gambar 18. Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha kelautan dan perikanan	40
Gambar 19. Pendampingan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terpilih di Wilayah IV, pada tanggal 6 Oktober-15 Desember 2025.....	45
Gambar 20. Rapat Sosialisasi Pembuatan Akun Serta Pengisian Data Simkopdes Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Oktober 2025 dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Oktober 2025.....	47
Gambar 21. Pembelajaran Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Wilayah NTT pada tanggal 22 Oktober 2025.....	50
Gambar 22. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kepada Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan Bekerja Sama dengan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO).....	53
Gambar 23. Identifikasi Kesiapan Pengelolaan Usaha Rantai Dingin di 5 (lima) lokasi Prioritas KNMP	56
Gambar 24. Pemetaan Kesiapan KDMP Pengelola KNMP di NTT pada tanggal 26-29 November 2025	60
Gambar 25. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dengan Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik pada tanggal 13 Oktober 2025	61
Gambar 26. Identifikasi Potensi Kemitraan Koperasi Perikanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 30 Oktober 2025	63
Gambar 27. Gambar Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan	65
Gambar 28. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Desember 2025	76
Gambar 29. Hasil Penilaian Wilayah Bebas Korupsi.....	79

Gambar 30. Penginputan Perencanaan Kinerja Tahun 2025.....	81
Gambar 31. Penginputan Capaian Kinerja Triwulan III 2025	81
Gambar 32. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dan Rincian Output Prioritas Lingkup Ditjen PDSPKP	82
Gambar 33. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	82

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 176 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana

- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- d. Direktorat Pengolahan;
- e. Direktorat Pemasaran; dan
- f. Direktorat Akses dan Promosi.

Selanjutnya dalam Pasal 187 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

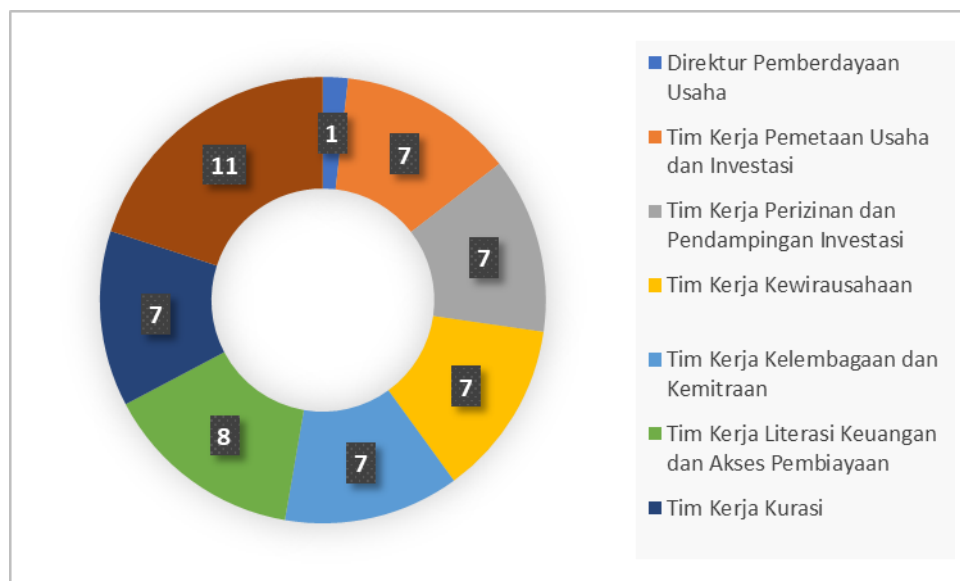
- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi

- pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

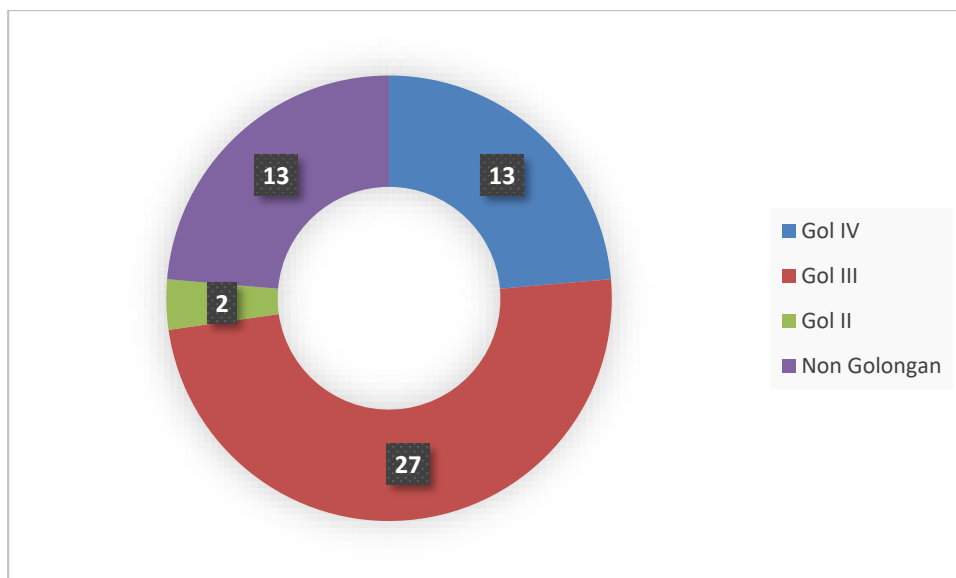
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berjumlah 55 orang, yang terdiri atas 42 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 2 orang Pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang tersebar di 6 Tim Kerja dan 1 Subbag Tata Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Pemetaan Usaha dan Investasi sebanyak 7 orang; Tim Kerja Perizinan dan Pendampingan Investasi sebanyak 7 orang; Tim Kerja Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan sebanyak 8 orang; Tim Kerja Kewirausahaan sebanyak 7 orang; Tim Kerja Kelembagaan dan Kemitraan sebanyak 7 orang; Tim Kerja Kurasi Usaha sebanyak 7 orang; dan Subbag Tata Usaha sebanyak 11 orang.



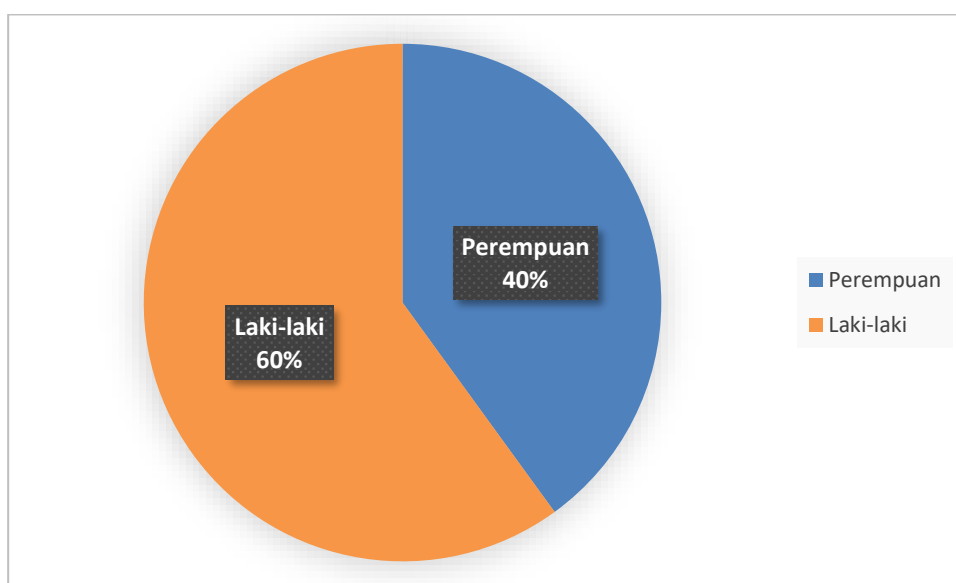
Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 27 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan Non Golongan sebanyak 13 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 49%.



Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

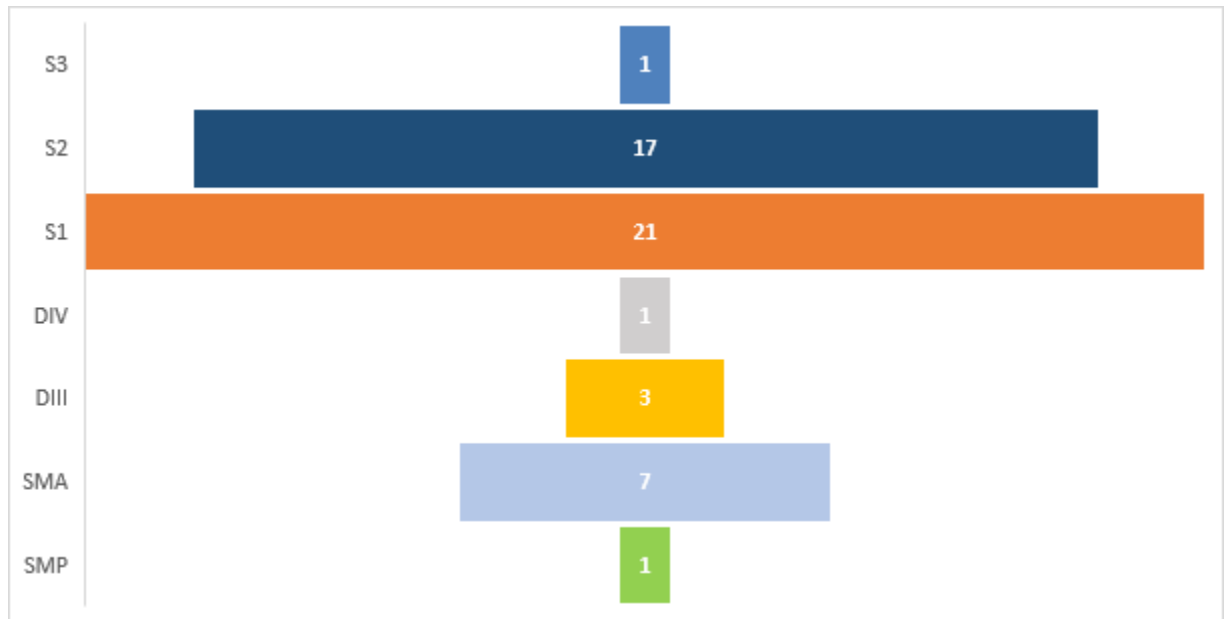
- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 33 orang, atau 60% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 22 orang, atau 40% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 20 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 7 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengolahan, akses modal terbatas, rantai pasok belum efisien, kualitas SDM dan teknologi yang kurang memadai, rendahnya nilai tambah produk, akses pasar terbatas dan lemahnya branding, dan kebijakan dan kordinasi yang belum sinkron.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian.

Dampak kondisi perekonomian nasional saat ini terhadap perkembangan sektor usaha kelautan dan perikanan sangat signifikan karena sektor ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal, perdagangan, dan daya beli masyarakat, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang

mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2025, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan I 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;

2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Renstra Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif terkait pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan pada lima tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu

“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Gambar 5. Visi Indonesia Emas 2045

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) **transformasi ekonomi**, dan (b) **ketahanan sosial budaya dan ekologi**. Dukungan tersebut akan dikuatkan dengan strategi sebagai berikut : (a) Hilirisasi Penangkapan Ikan berbasis komoditas unggulan, (b) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, (c) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional, (d) Pengembangan industri

pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, (e) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, (f) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat dan (g) Penguatan pasar luar negeri.

2.1.2 Misi

Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden (Bab 1) serta Misi KKP yang mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 8**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
2. **“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan **Misi Asta Cita 6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
3. **“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 3**, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan **Misi Asta Cita 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”**

yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan

5. **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 7**, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- (a) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- (b) Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut, yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah **“meningkatkan mutu dan daya saing**

hasil produk kelautan dan perikanan”. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis (SS) pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai *outcome/impact* dari program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025-2029. Sebagai organisasi di bawah KKP, sasaran strategis Ditjen PDSPKP melekat pada sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Dari lima sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung secara langsung dua sasaran strategis, yaitu: **SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**, dan **SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas**.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada Bagian A dan kebijakan KKP pada Bagian B, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029 yang disampaikan pada Bab 2. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pada agenda **transformasi ekonomi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 4: Iptek inovasi dan produktivitas ekonomi, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Pengembangan UMKM kelautan dan perikanan tembus pasar global
 - Kemudahan akses pembiayaan
- ❖ IE 7: Integritas ekonomi domestik global, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Peningkatan investasi asing serta integrasi produk KP pada skema GPN
 - Penguatan sistem logistik ikan nasional
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung hilirisasi
 - Transformasi digital pemasaran produk dan jasa ekosistem kelautan dan perikanan

Selanjutnya pada agenda **ketahanan sosial budaya dan ekologi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
 - Penyediaan sistem rantai dingin yang merata
 - Pengembangan pangan akuatik (*blue foods*)
 - Penanganan *stunting* melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Dengan memperhatikan semua arahan tersebut, maka target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan:

“Kebijakan PDSPKP : Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”

Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

a. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.**

- ❖ Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan

- ❖ Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan

b. Program Dukungan Manajemen. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:

- ❖ Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. Pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi

Mengidentifikasi dan menganalisa potensi dan peluang **usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** sehingga potensi dan peluang tersebut dapat dipetakan dan siap ditawarkan kepada para calon pelaku usaha atau investor.

Langkah operasional yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1) Identifikasi potensi pemberdayaan usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan pada suatu kawasan atau wilayah
- 2) Analisa potensi usaha dan investasi menjadi satu peluang usaha dan investasi komoditas unggulan pada suatu kawasan atau wilayah yang siap ditawarkan kepada calon pelaku usaha atau investor
- 3) Pemetaan peluang usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan

2. Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan

1) Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- Identifikasi tingkat literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Analisa intervensi yang dibutuhkan untuk masing-masing tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Penyusunan bahan dan materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Sosialisasi dan edukasi bahan dan materi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan bimbingan teknis literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pendampingan literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan

2) Akses Pembiayaan

Kegiatan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengakses sumber pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menjalin kemitraan yang menguntungkan untuk memperluas skala bisnis mereka. Dengan kemudahan akses pembiayaan dan kemitraan, diharapkan usaha kecil dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, langkah-langkah untuk peningkatan akses melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro, dan dana bergulir adalah:

- Identifikasi calon debitur potensial berbasis kelas UMKM dan/atau data KUSUKA
- Fasilitasi akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan
- Pembinaan klaster pembiayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Pembentukan Pokja Kredit Program melibatkan lembaga penyalur kredit program

- Sinergi mendukung program prioritas KKP dalam hal fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan juknis penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan laporan kebutuhan pembiayaan usaha
- Evaluasi kebutuhan pembiayaan oleh Tim Pokja Kredit Program
- Penetapan kelayakan pembiayaan dan jenis kredit yang diberikan
- Pendampingan akses pembiayaan oleh tenaga pendamping atau penyuluh perikanan
- Fasilitasi penyaluran kredit melalui lembaga penyalur kredit program Pemerintah
- Analisis dampak pelaku usaha penerima kredit program

3. Fasilitasi Pendampingan Kewirausahaan dan Pembentukan Wirausaha Baru Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Kegiatan ditujukan untuk: (a) menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, (b) menciptakan wirausaha baru produk KP yang inovatif dan kreatif, (c) meningkatkan kapasitas wirausaha yang akan naik kelas, (d) membentuk wirausaha berkarakter kuat dan handal, dan (e) Penguatan kapasitas usaha menuju wirausaha mapan dan calon wirausaha ekspor.

Sasaran **penumbuhan usaha** baru adalah siswa/purna siswa sekolah menengah atas/kejuruan, mahasiswa/alumni perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sedangkan **sasaran pendampingan** wirausaha adalah pelaku usaha/wirausaha yang membutuhkan pendampingan usaha. **Langkah-langkah** yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan wirausaha kelautan dan perikanan adalah:

1. Sosialisasi kewirausahaan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang wirausaha dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam berwirausaha.
2. Analisis kebutuhan untuk menggali informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh calon wirausaha dalam membangun sebuah usaha
3. Seleksi calon wirausaha yang benar-benar berminat dan tidak beralih ke pekerjaan lain
4. Pelatihan peningkatan kapasitas calon wirausaha/wirausaha yang akan naik kelas.

4. Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Kemitraan Usaha

1. Kelembagaan Usaha

Fasilitas pengembangan kelembagaan menjadi titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitas pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Langkah operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha meliputi :

- 1) Penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum
- 2) Fasilitas pembentukan lembaga usaha berbadan hukum
- 3) Identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya
- 4) Perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan
- 5) Penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis
- 6) Pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi
- 7) Pembentukan dan pembinaan lembaga inkubator bisnis
- 8) Pengembangan usaha di dalam dan luar kawasan usaha
- 9) Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha

2. Kemitraan

Fasilitas ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan

usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

Langkah operasional pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan kemitraan
2. Fasilitasi dan pendampingan usaha perikanan sektor hulu (tangkap dan budidaya) untuk bermitra dengan usaha hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
3. Fasilitasi kerjasama usaha mikro kecil dan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Fasilitasi kerjasama UMKM hasil kelautan dan perikanan dengan BUMN dalam rangka mengakses Program Kemitraan BUMN
5. Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk bermitra dengan distributor dan jaringan pemasaran digital.

5. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan Serta Pendampingan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sistem perizinan berusaha saat ini dilaksanakan berbasis risiko, *post audit* dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS). Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha mendapatkan mandat melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen untuk setiap pelaku usaha dengan status PMA.

Tujuan utama fasilitasi pelayanan perijinan berusaha adalah memberikan keterbukaan akses informasi kepada pelaku usaha perihal persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu perijinan serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dengan harapan pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang terbaik dan merasakan manfaat atas pelayanan perijinan yang diberikan. Alur perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran ikan adalah:

1. Mendaftar melalui situs <http://oss.go.id> untuk mendapatkan akses dengan membuat akun nama pengguna dan kata sandi
2. Memasukkan bidang usaha, nilai investasi serta kelengkapan data pendukung maka sistem akan menerbitkan NIB
3. Sistem OSS RBA akan memverifikasi pengajuan pada tahapan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak
4. Jika mengambil KBLI dengan tingkat risiko menengah rendah izin usahanya terbit otomatis, sedangkan KBLI dengan tingkat berisiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar
5. Sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan izin usaha dan bisa digunakan untuk mengurus PB untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU) untuk operasional dan komersial
6. Kewajiban pelaku usaha setelah perizinan berusaha terbit:
 - Memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala usaha mikro dan kecil paling lama 2 (dua) tahun dan Skala usaha menengah dan besar paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan
 - Membuat laporan kegiatan usaha pengolahan ikan setiap 6 (enam) bulan kepada Penerbit Sertifikat Standar.

Pendampingan investasi dilakukan untuk menindaklanjuti rencana investasi dalam dokumen usulan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Selain itu, pendampingan investasi juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil promosi peluang investasi kelautan dan perikanan yang berupa minat investasi pada sektor kelautan dan perikanan, baik dari PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan untuk melakukan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen, serta pendampingan investasi adalah:

1. Penyiapan bahan kebijakan pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik dalam rangka penguatan budaya layanan prima

3. Pendampingan perijinan berusaha, verifikasi dokumen rencana kegiatan usaha dan penerbitan perizinan berusaha
4. Sosialisasi kebijakan perizinan berusaha
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan pengolahan ikan, pemasaran ikan, dan jasa pasca panen penangkapan ikan
6. Pendampingan pelaporan kegiatan usaha
7. Verifikasi calon investor yang minat investasi dan/atau memiliki rencana investasi di sektor kelautan dan perikanan
8. Pendampingan calon investor dalam rangka penyelesaian hambatan investasi, fasilitasi perolehan insentif fiskal dan non-fiskal, serta percepatan realisasi investasi
9. Analisis dan pemantauan capaian realisasi usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Sosialisasi dan edukasi tata cara melakukan usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
11. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1, Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan pada tingkat kementerian, pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha guna memastikan keselarasan antara sasaran, indikator kinerja, dan kebijakan strategis yang ditetapkan.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	1.	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	13,11
		2.	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	3.	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5
		4.	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6
		5.	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81
		11.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

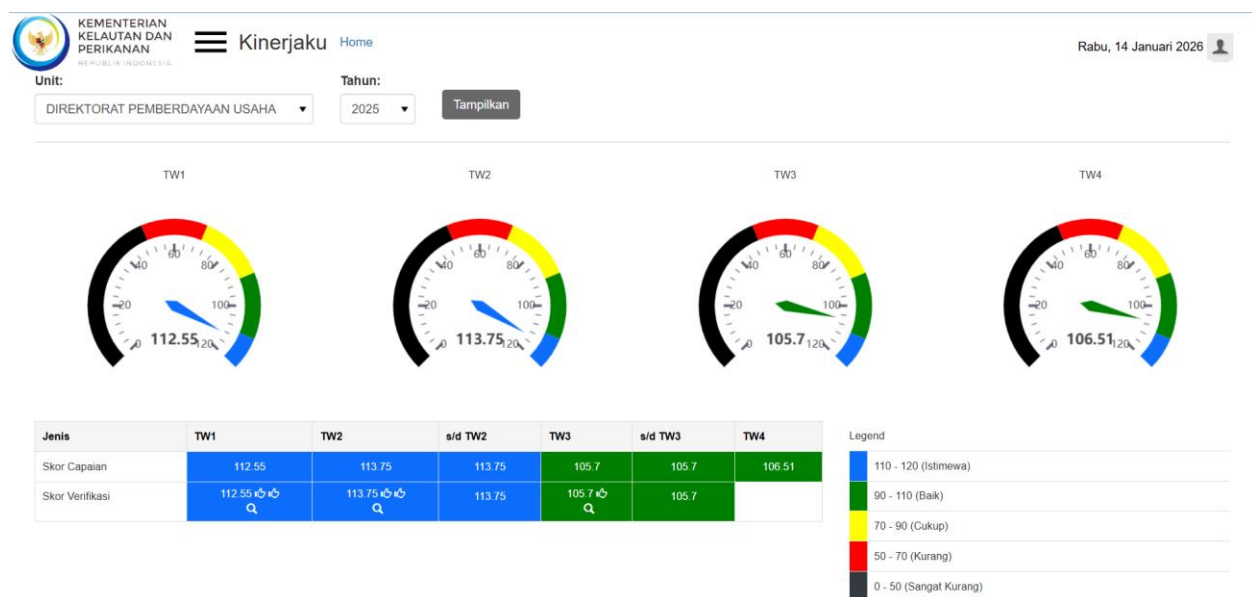
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	1.	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	13,11
2.	Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	2.	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan	5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	3.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		4.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		5.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		7.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81
		8.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 sebesar 106,51% dengan predikat Baik.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2025, terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 8 (delapan) Indikator Kinerja.

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi		
		2025	TW IV	Sd TW IV	% thd Target TW IV	% sd thd Target 2025
1	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	13,11	13,11	10,83	82,61	82,61
2	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5	5	6,49	129,8	129,8
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95	95	100	105,26	105,26
4	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100	100	100	100	100
5	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	75	86,69	115,59	115,59
6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86	86	86,70	100,81	100,81
7	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	87	87,67	110,52	110,52
8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	1	2	200	200

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan

IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan

investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode triwulan I dan II, nilai investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data yang telah diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi yang berasal dari PMDN dan PMA merupakan kontribusi perusahaan swasta terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun mulai triwulan III dan triwulan IV, nilai investasi KP dihitung dari penjumlahan realisasi PMDN, PMA, dan nilai Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai investasi dari Kredit Investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan, yakni perbankan dan non perbankan. Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Persentase Realisasi Terhadap Target 2025
	TW IV 2025	TW III 2025	TW IV 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW III 2025	TW IV 2024	S.d Tahun 2025	TW IV 2025	TW III 2025	TW IV thn 2024	
Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	13,11	7,33	9,00	13,11	10,83*	7,82	12,35	10,83*	82,64	106,6	137,21	82,64

Ket : * Angka Prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan IV tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp10,83 triliun, yakni 82,64% dari target triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp13,11 triliun, terdiri dari PMA Rp2,71 triliun, PMDN Rp5,40 triliun dan kredit investasi sebesar Rp2,73 triliun sebagaimana Tabel 4 Perkiraan realisasi investasi KP tahun 2025 sebesar Rp10,83 triliun apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025 yakni

sebesar Rp7,24 mencapai 149,59%. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp12,35 triliun, maka capaian ini mengalami perlambatan sebesar 12,28%.

Realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar Rp12,35 triliun, berkontribusi 0,72% dari total investasi nasional tahun 2024 sebesar Rp1.714,20 triliun. Realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp7,82 triliun, yaitu terdiri dari PMDN sebesar Rp3,97 triliun, PMA sebesar Rp 1,98 triliun dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp1,87 triliun, berkontribusi 0,55% terhadap total investasi nasional triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.434,30 triliun.

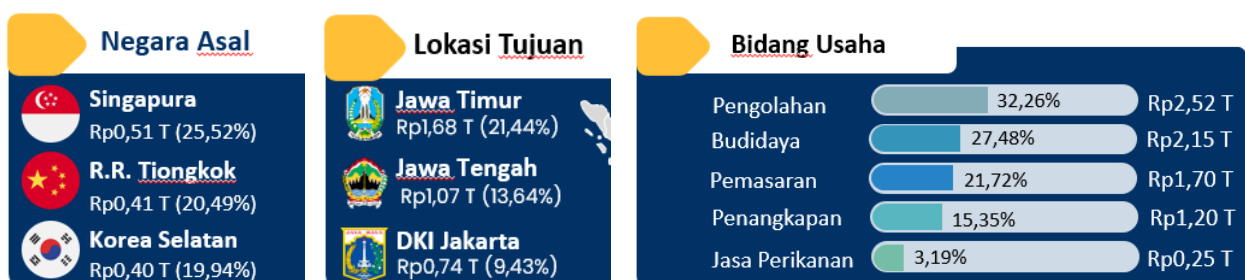


Gambar 7. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sumber Permodalan Triwulan III 2024 - 2025

Ket: *) angka prognosa

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diolah Ditjen PDS

Realisasi PMA diperkirakan mengalami perlambatan 41,21% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,60 triliun. Adapun realisasi PMDN diperkirakan meningkat 15,22% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,68 triliun, dan kredit investasi diperkirakan melambat 10,86% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,06 triliun.



Gambar 8. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara (Top 3), Lokasi Tujuan dan Bidang Usaha Periode Triwulan III Tahun 2025

Gambar 8. menunjukkan TOP 3 asal negara investor di Indonesia pada periode triwulan III tahun 2025 adalah Singapura, R.R Tiongkok dan Korea Selatan. Realisasi PMA terbesar berasal dari Singapura sebesar Rp0,51 triliun (25,52%), RRT Rp0,41 triliun (20,49%), disusul Korea Selatan Rp19,94 triliun (19,94%). Lokasi tujuan utama investasi di Indonesia adalah Jawa Timur sebesar Rp1,68 triliun (21,44%), Jawa Tengah Rp1,07 triliun (13,64%), disusul DKI Jakarta Rp0,74 triliun (9,43%). Sedangkan bidang usaha yang menjadi tujuan investasi yaitu pengolahan sebesar Rp2,52 triliun (32,26%), budidaya Rp2,15 triliun (27,48%), pemasaran Rp1,70 triliun (21,72%), penangkapan Rp1,20 triliun (15,35%) dan jasa perikanan Rp0,25 triliun (3,19%).

Faktor penghambat tidak tercapainya investasi sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain dipengaruhi oleh:

- a) Dinamika perekonomian global tahun 2025 yang masih diwarnai ketidakpastian, perlambatan pertumbuhan ekonomi global (diproyeksikan sebesar 3,2% oleh IMF), serta penerapan kebijakan moneter yang relatif ketat.
- b) Kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, diantaranya penerapan tarif impor yang tinggi, kasus Cesium 137 pada udang asal Indonesia, serta kewajiban alat penangkapan pada jenis ikan tertentu, khususnya rajungan.
- c) Ketidakpastian perdagangan global yang berdampak pada penurunan minat investasi akibat menurunnya permintaan ekspor untuk produk/komoditas tertentu, meningkatnya biaya produksi, tertekannya profitabilitas, serta meningkatnya volatilitas pasar.
- d) Ketidakpastian kebijakan domestik yang mendukung calon investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

- a) Melakukan pendampingan investasi bidang kelautan dan perikanan;
- b) Melakukan penyusunan model bisnis dan bisnis proposal usaha komunal pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang siap ditawarkan kepada calon investor; Melakukan koordinasi dalam rangka promosi investasi kelautan dan perikanan.

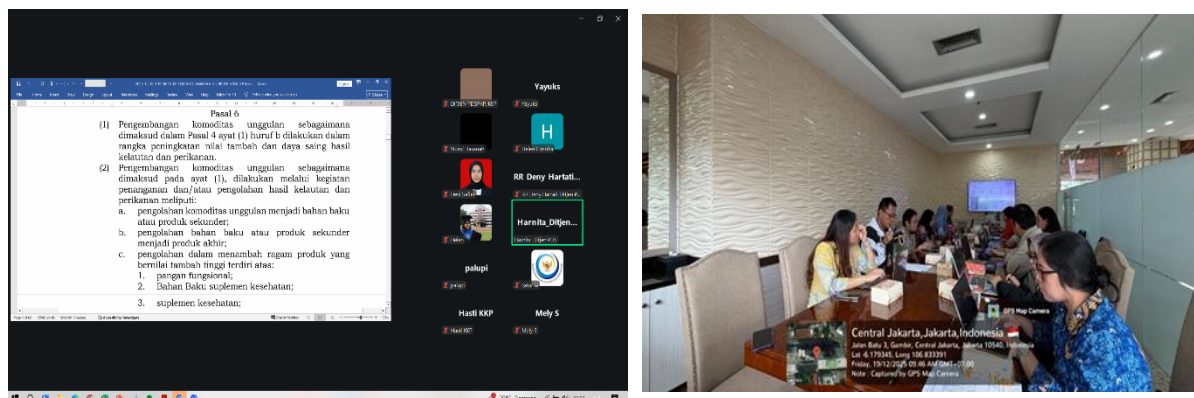
Direktorat Pemberdayaan Usaha telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp509.305.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp509.285.233,- atau setara dengan 99,996%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi usaha kelautan dan perikanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan.

Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha melanjutkan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan. Rancangan sudah dikoordinasikan dengan kementerian terkait dan mendapat persetujuan dari BKPM dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kawasan hilirisasi mencakup kegiatan pengolahan, penanganan, distribusi, dan pengangkutan hasil kelautan dan perikanan, tidak hanya terbatas pada kawasan industri dan dirancang terintegrasi dari produksi hingga pengolahan, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku lokal dan akses logistik. Sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan masih dalam tahap Penyempurnaan.



Gambar 9. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan

Gambar 2

2. Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan pada suatu wilayah dalam rangka meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain :

- a. Promosi potensi dan peluang investasi pengolahan tuna di Kabupaten Biak Numfor dan promosi potensi dan peluang investasi industri pengolahan ikan di Kota Tual melalui media sosial.

b. Investment and Business Matching 2025

Investment and Business Matching 2025 dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan dilaksanakan di Ballroom GMB III KKP, dibuka oleh Sekretaris Jenderal KKP dan dihadiri oleh 351 peserta secara luring dan 1.395 peserta daring, antara lain perwakilan kedutaan besar negara mitra, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, asosiasi, perusahaan KP, pengelola kawasan industri, investor, dan NGO.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah memfasilitasi promosi 36 proyek investasi dengan total nilai Rp3,02 triliun antara lain Industri pengolahan tuna, udang & *cold chain* di Kab. Cilacap, Pabrik garam industri di Kab. Jeneponto, Fasilitas pengolahan dan logistik perikanan di Kawasan Industri Bolok – NTT dan Pabrik olahan rumput laut berbasis nori oleh PT Karya Noribet Indonesia di Bandung. Minat investasi dan kemitraan usaha yang terjaring melalui *one on one meeting* sebesar Rp1,60 Triliun.



Gambar 10. Investment and Business Matching 2025

c. Pendampingan Rencana Investasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan pendampingan realisasi minat investasi. Pendampingan dilakukan kepada pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan melalui pemantauan, pendampingan dan evaluasi terhadap minat dan rencana investasi. Pada tahun 2025 telah dilakukan pendampingan realisasi minat dan rencana investasi kepada 18 pelaku usaha dan pada periode triwulan IV pendampingan dilakukan pada lima pelaku usaha, yaitu:

1) Pendampingan Rencana Investasi PT Indodana Brata integritas

PT Indodana Brata Integritas merupakan perusahaan PMDN skala usaha besar yang akan bermitra dengan perusahaan dari Tiongkok untuk membentuk PMA dari Australia. Rencana investasi adalah pembangunan sektor KP terintegrasi dari penangkapan ikan, pembangunan dan pengelolaan kawasan industri perikanan yang terintegrasi serta pengolahan dan pemasaran hasil KP. Untuk memperoleh fasilitas insentif investasi, PT Indodana Brata Integritas menargetkan untuk membangun atau melakukan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memang memiliki fasilitas ultimate untuk

investasi, baik fiskal maupun non fiskal, dibandingkan dengan kawasan usaha lainnya. Saat ini PT Indodana Brata Integritas sedang dalam proses pencarian peluang lokasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perikanan terpadu, dengan target diantaranya adalah Aceh dan KEK Bitung.

Kegiatan pendampingan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2025 di Ruang Rapat Pemberdayaan Usaha GMB III dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, dan dihadiri oleh perwakilan PT Indodana Brata Integritas dengan didampingi Bapak Anang Nugroho, Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan audiensi tersebut diharapkan PT Indodana Brata Integritas dapat menyiapkan kajian/studi rencana investasi yang akan dilaksanakan dan Ditjen PDS bersama unit kerja terkait akan bersinergi melakukan pendampingan rencana investasi.



Gambar 11. Pendampingan Investasi PT Indodana Brata Integritas

2) Pendampingan Rencana Investasi PT Bhawana Siga Caraka

PT Bhawana Siga Caraka merupakan PMA yang berasal dari Korea dan berkantor di Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut berencana melakukan investasi di bidang perikanan khususnya pengolahan Cumi kering dengan tujuan ekspor ke Korea. Rencana investasi sebesar Rp12 miliar. Perusahaan tersebut bekerjasama dengan PT Alami Indah Bersinar yang telah memiliki izin usaha untuk KBLI 46206, perdagangan besar hasil perikanan, di Pekalongan, Jawa Tengah.

Audiensi dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 di Ruang Rapat Pemberdayaan Usaha, dihadiri oleh Direktur PT Bhawana Siga Caraka Bapak Chrys Kelana bersama tim Direktorat Pemberdayaan Usaha. Direktur PT Bhawana Siga Caraka menyampaikan permohonan pendampingan terkait proses Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pengolahan cumi kering sampai dapat melakukan ekspor ke Korea.



Gambar 12. Pendampingan Investasi PT Bhawana Sibra Caraka

3) Pendampingan Rencana Investasi PT Oceva Indonesia Nusantara

PT Oceva Indonesia Nusantara merupakan perusahaan PMDN yang bergerak dibidang pengembangan komoditas rumput laut dengan *blue economy and net positive principles*. Rencana investasi berupa pengembangan komoditas rumput laut terintegrasi dengan produk yang dihasilkan adalah bioplastic/sedotan *compostable*. PT Oceva telah mendapatkan pendanaan dari dalam negeri sebesar 6 juta USD, dan sedang berproses untuk memperoleh investasi asing sebesar 150 juta USD untuk pengembangan komoditas rumput laut. Rencana investasi yang dilakukan adalah pengembangan komoditas rumput laut terintegrasi dari hulu ke hilir dengan produk yang dihasilkan adalah bioplastik/sedotan berbahan dasar rumput laut yang dapat terurai sepenuhnya / *compostable*. Pembangunan proyek percontohan direncanakan akan dilakukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Audiensi dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, dan dihadiri oleh Fahrana Amelia Lubis - Founder PT Oceva Indonesia Nusantara, perwakilan Direktorat Rumput Laut - DJPB dan perwakilan lingkup Ditjen PDS, yaitu Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran, Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Akses Promosi dan BBP3KP. Berdasarkan hasil audiensi, PT Oceva Indonesia Nusantara diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait rencana pengembangan komoditas rumput laut di KEK di Sulawesi Selatan dan segera melakukan penyusunan studi kelayakan pengembangan komoditas rumput laut, mulai dari penguatan sumber bahan baku hingga ke pasar produk akhir.

Ditjen PDS lebih lanjut akan bersinergi dengan unit kerja KKP terkait untuk melakukan pendampingan rencana investasi tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Gambar 13. Pendampingan Investasi PT Oceva Indonesia Nusantara

4) Pendampingan Rencana Investasi PT Seasix Energy Indonesia

Berdasarkan data [Investment Project Ready to Offer \(IPRO\)](#) Peluang Investasi Pembangunan Pabrik Pengolahan di Kabupaten Paser, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melakukan audiensi terhadap PT Seasix Energy Indonesia pada tanggal 20 November 2025 di Ruang Ballroom KKP GMB III.

Pada audiensi tersebut PT Seasix Energy Indonesia menyampaikan kebutuhan bahan baku rumput laut jenis *E. cottoni* dan berminat melakukan pengembangan budidaya rumput laut tersebut di Kabupaten Paser senilai Rp3,6 miliar.

PT Seasix Energy Indonesia diharapkan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser terkait rencana pengembangan rumput laut di Kabupaten Paser. Ditjen PDS bersama unit kerja KKP terkait akan bersinergi untuk melakukan pendampingan rencana investasi tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Gambar 14. Pendampingan Rencana Investasi PT Seasix Energy Indonesia

5) Pendampingan Rencana Investasi PT Panen Laut Lestari

Berdasarkan data [Investment Project Ready to Offer \(IPRO\)](#) Peluang Investasi Pembangunan Pabrik Pengolahan di Kabupaten Paser, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melakukan audiensi terhadap PT Panen Laut Lestari pada tanggal 20 November 2025 di Ruang Ballroom KKP GMB III.

Pada audiensi tersebut, PT Panen Laut Lestari menyampaikan minat untuk melakukan investasi pembangunan unit pengolahan rumput laut di Desa Pondong Baru, Kuaro senilai Rp23,54 miliar sebagaimana IPRO yang disusun oleh Pemda Kab Paser.

PT Panen Laut Lestari diharapkan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah terkait rencana pengembangan rumput laut di Kabupaten Paser. Ditjen PDS bersama unit kerja KKP terkait akan bersinergi untuk melakukan pendampingan rencana investasi tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Gambar 15. Pendampingan Rencana Investasi PT Panen Laut Lestari

1. Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program strategis, yang memudahkan para investor untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan antara lain: Layanan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, sebagai indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Realisasi penerbitan sertifikat standar pada Tahun 2025 mencapai 50 Sertifikat Standar, yakni tercapai 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar 47 sertifikat maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 6,38 %.



Gambar 16. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan

Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian indikator tersebut, rencana aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui kegiatan Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam pemenuhan aspek legalitas dan perizinan usaha. Pada Tahun 2025, kegiatan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran ditetapkan dengan target 20 pelaku usaha, dan hingga Triwulan IV Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 21 UMKM atau 105% dari target. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan kegiatan baru di tahun 2025.

Tabel 4. Fasilitas perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		
	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Pelaku Usaha yang Difasilitasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran	4	-	20	5	-	21	125	-	105

Kegiatan Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025, meliputi:

1. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan IV 2025, telah dilaksanakan 4 (empat) kali rapat verifikasi dan pembahasan dokumen persyaratan. Pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP pada tanggal 21 Oktober, 4 dan 7 November, serta 12 Desember 2025 di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta melalui *video conference*. Adapun Selama periode Triwulan IV telah diterbitkan 6 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 3 pelaku usaha (PT. Aceh Jaya Lampulo Bahari, PT. HOH Food Global, PT. Samudera New Indonesia) yang bermohon dengan rincian 3 (tiga) Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 3 (tiga) Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang

Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 17. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp. 51.468.101,- atau setara dengan 99.95% dari total pagu efektif sebesar Rp51.492.000,-.

3.2.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan

IK2. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkat Omsetnya

Potensi UMKM kelautan dan perikanan masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Namun upaya pengembangan UMKM kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah aspek finansial dalam hal ini peningkatan omset. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kelautan dan perikanan diperlukan strategi pemberdayaan yang berpihak kepada UMKM dan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan omsetnya.

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya dalam rangka mendorong tumbuhnya UMKM untuk meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5% UMKM yang meningkat omsetnya dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\Sigma n \% = (\Sigma n1 / \Sigma n2) \times 100\%$$

$\Sigma n \% =$ Persentase peningkatan omset UMKM Pengolahan Produk KP

$\Sigma n1 =$ Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya

$\Sigma n2 =$ Jumlah UMKM yang dibina

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		
	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	2,5	-	5	3,99	-	6,49	159,6	-	129,8%

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas sebesar 6,49% dari 647 UMKM terkurasi atau sejumlah 42 UMKM. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 5% maka realisasi presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas mencapai 129,8%.

Usaha mikro, kecil dan menengah bidang pengolahan produk krelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasional)

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP

Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP membentuk wirausahawan yang inovatif, adaptif dan memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola usaha. Pada bulan januari, Maret, Juni 2025 telah di laksanakan kegiatan di kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor untuk menjadi Target UMKM Naik kelas. kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis UMKM KP dan output kegiatan sebanyak 85 UMKM. Kegiatan penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha existing den gan Pelaksanaan Webinar

“Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas dan Profitabilitas Wirausaha Perikanan Berkelanjutan” Series 1 – 8 pada rentang Bulan September – Desember 2025 setiap hari Selasa per 2 (dua) minggu.

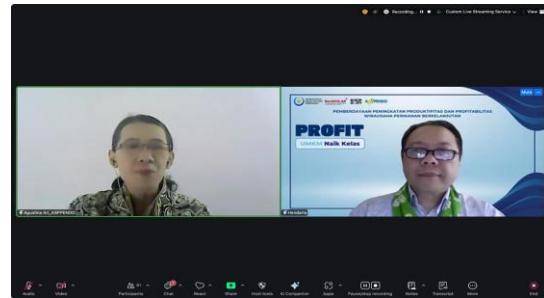
Selama periode triwulan IV, kegiatan penumbuhan dan pembinaan wirausaha KP yang dilakukan pada triwulan IV adalah :

a. Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi UMKM Naik Kelas Sektor Kelautan dan Perikanan – Ekspor ke Malaysia

Kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan bagi UMKM naik kelas sektor kelautan dan perikanan bertujuan mendukung UMKM naik kelas melalui penguatan sertifikasi, pembiayaan, dan perluasan akses pasar. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi UMKM Naik Kelas Sektor Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat peluang ekspor ke Malaysia dilaksanakan pada Selasa, 2 Desember 2025 secara hybrid dan diikuti oleh 99 UMKM terdaftar, terdiri dari 51 peserta luring dan 139 peserta daring. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur dan Perwakilan Diaspora Malaysia Sebagai narasumber, dengan peserta UMKM perikanan dan kelautan.

b. Webinar KKP kerjasama Asppendo

Kegiatan Webinar KKP kerjasama Asppendo dengan tema Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas dan Profitabilitas Wirausaha Berkelanjutan. Webinar tersebut telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Series ketiga dengan tema Pengenalan kelengkapan dokumen ekspor pada tanggal 13 Oktober 2025, series keempat dengan tema Hilirisasi produk KP berbasis pemenuhan regulasi keamanan pangan tanggal 28 Oktober 2025, series kelima dengan tema Strategi penerapan SOP dalam peningkatan omset usaha KP tanggal 12 November 2025, series keenam dengan tema pengelolaan UMKM perikanan : Berkelanjutan, efisien dan ramah lingkungan tanggal 25 November 2025, series ketujuh dengan tema strategi penerapan BMC untuk mencapai skema bisnis B2B bagi umkm pangan tanggal 9 Desember 2025 dan series kedelapan dengan tema penyusunan HPP ekspor tanggal 24 Desember 2025 .



Gambar 18. Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha kelautan dan perikanan

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis wirausaha sektor kelautan dan perikanan baik yang sudah ekisting maupun wirausaha baru sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya.

Realisasi capaian output dari kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha hasil KP sebanyak 137 wirausaha sektor kelautan dan perikanan atau tercapai 100% dari target. Capaian ini konsisten dengan kinerja tahun sebelumnya dan menunjukkan keberlanjutan upaya pembinaan usaha sebagai bagian dari ekosistem peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 6. Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		
	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	7	635	137	7	635	137	100	100	100

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja tersebut, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp1.066.607.069,- atau setara dengan 99,98% dari total pagu anggaran

sebesar Rp1.066.728.000,-. Tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta didukung oleh pengendalian pelaksanaan anggaran yang optimal. Selisih anggaran yang relatif kecil mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas maupun output yang dihasilkan, sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan kapasitas Lembaga usaha KP

Fasilitasi pengembangan kelembagaan merupakan titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 fasilitasi pengembangan kelembagaan dilakukan melalui: penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum, fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbadan hukum, identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya, perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan, penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi, fasilitasi perluasan akses pasar dan kemitraan dengan pelaku usaha/lembaga usaha lain serta monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha untuk dapat diketahui peningkatan kinerjanya. Untuk mengetahui peningkatan kinerja lembaga usaha, telah dilakukan evaluasi kinerja awal melalui pendataan kepada unit koperasi terpilih yang kemudian akan dibanding dengan hasil evaluasi kinerja di akhir tahun.

Kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan tahun 2025 merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan target capaian ditetapkan sebanyak 22 lembaga. Namun, selama pelaksanaan kegiatan, terjadi penyesuaian anggaran melalui

mekanisme *automatic adjustment*. Penyesuaian ini berdampak pada pengurangan alokasi anggaran kegiatan, sehingga target capaian perlu disesuaikan menjadi 6 lembaga. Jumlah fasilitasi pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 telah mencapai 2 lembaga usaha, dengan total capaian keseluruhan sejak triwulan I adalah 6 lembaga usaha yaitu telah mencapai 100%.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan IV 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi terhadap target 2025
	TW IV 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	-	-	-	6%	-	-	-	6%	-	-	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2025, didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga Usaha pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang Ditingkatkan kapasitasnya) Triwulan IV 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target				Persentase Realisasi s.d TW IV terhadap target 2025
	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	Tahun 2025	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	Tahun 2025	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	Tahun 2025	
Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya)	2	2	1	6	2	2	1	6	100%	100%	100%	100%	100%

1) Pendampingan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terpilih di Wilayah IV, pada tanggal 6 Oktober-15 Desember 2025

Dalam rangka Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT), telah dilakukan kegiatan Pendampingan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pendampingan dilakukan kepada 24 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terpilih di Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT) dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober s.d 15 Desember 2025, meliputi:
 - Kabupaten Gresik: KDMP Pangkahwetan, KDMP Pangkahkulon dan KDMP Campurejo;
 - Kabupaten Pasuruan: KDMP Mlaten, KDMP Jarangan dan KDMP Gerongan;
 - Kabupaten Tabanan: KDMP Gadungan, KDMP Antap dan KDMP Apuan;
 - Kabupaten Badung: KKMP Tanjung Benoa, KDMP Kekeran dan KDMP Kutuh;
 - Kabupaten Lombok Timur: KDMP Labuhan Haji, KDMP Jerowaru dan KDMP Sugian;
 - Kabupaten Lombok Tengah: KDMP Tumpak, KDMP Syariah Bunkate dan KDMP Kidang;
 - Kabupaten Kupang: KDMP Tablolong, KDMP Bokonusan dan KDMP Bolok; dan
 - Kota Kupang: KKMP Oesapa, KKMP Fatubesi dan KKMP Namosain.
- b. Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) tenaga pendamping profesional yang bertanggung jawab atas pendampingan kepada 3 KDKMP. Bentuk pendampingan meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan bisnis wajib dan bisnis perikanan, digitalisasi, penguatan pasar, dan perbaikan tata kelola keuangan koperasi. Progres pendampingan diukur berdasarkan capaian pendampingan melalui monitoring dan evaluasi setiap dua minggu. Selama pendampingan, tim pendamping berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, penyuluh perikanan dan kepada desa/lurah setempat.
- c. Dari hasil pendampingan didapatkan kinerja KDKMP meningkat, semula pada kisaran 23%–74% menjadi sekitar 50,6%–86,6%, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari 24 KDKMP, 79% di antaranya telah memiliki legalitas lengkap (AD/ART, Akta Notaris, AHU, NIB, NPWP, NIK, dan rekening bank) dan 21% lainnya masih dalam proses melengkapi;

- Keanggotaan koperasi meningkat, terutama pada KDMP Tumpak dan Antap. Kenaikan anggota menjadi sumber penguatan modal internal melalui simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - Kemitraan usaha KDKMP meningkat, sebelum pendampingan hanya 5 KDKMP (KDMP Pangkahwetan, KDMP Gadungan, KDMP Kutuh, KKMP Fatubesi dan KDMP Mlaten) yang memiliki mitra dan setelah pendampingan terdapat 21 KDKMP sudah memiliki mitra, terutama dengan Bulog, Pertamina, ID Food, BRI/Himbara, dapur SPPG, perusahaan pengolahan ikan dan pelaku usaha lokal lainnya. Kemitraan ini berkaitan dengan pasokan sembako, LPG, pupuk, pakan, serta pemasaran produk perikanan dan hasil olahan;
 - Sebelum pendampingan, hanya 4 KDKMP (KDMP Pangkahwetan, KDMP Gadungan, KDMP Kutuh dan KKMP Fatubesi) yang menjalankan usaha wajib, dan setelah pendampingan ada 14 KDKMP yang telah menjalankan usaha wajib, lainnya masih dalam tahap perintisan gerai sembako dan rencana kerjasama dengan Bulog dan Himbara;
 - Sebelum pendampingan hanya 2 KDKMP yang melaksanakan usaha di sektor kelautan dan perikanan, yaitu KDMP Pangkahwetan dan KDMP Mlaten dan setelah pendampingan menjadi 14 KDKMP memiliki unit usaha/rencana usaha kelautan dan perikanan. Usaha perikanan yang dijalankan antara lain pemasaran ikan segar, olahan ikan (pindang/asap/abon/stick ikan), budidaya ikan dan rumput laut, dan rencana wisata dan kuliner berbasis sumber daya perikanan lokal.
- d. Secara kelembagaan, seluruh KDKMP telah memiliki struktur organisasi dan sebagian besar sudah dilengkapi jobdesk pengurus, pengawas, SOP, serta telah siap melakukan RAT Tahun Buku 2025 karena telah tersedia draft LPJ dan standar pelaporan. Pencatatan keuangan mulai dibangun dengan penggunaan 16 buku koperasi, plang nama, buku kas, serta pengenalan aplikasi keuangan sederhana.
- e. Untuk pengembangan bisnis, pendamping bersama pengurus telah menyusun model bisnis, proposal bisnis dan proposal pembiayaan yang dapat disampaikan kepada calon investor, mitra potensial dan lembaga pembiayaan.
- f. Di sisi digitalisasi KDKMP juga telah memiliki dan melakukan pengkinian data di akun SIMKOPDES, serta memiliki akun media sosial sebagai sarana komunikasi dengan anggota atau sosialisasi dengan warga desa/kelurahan.

g. Kendala yang dihadapi selama proses pendampingan KDKMP antara lain:

- Masih lemahnya komitmen sebagian pengurus KDKMP untuk menjalankan usaha KDKMP;
- Pengurus KDKMP belum memanfaatkan fasilitas pendampingan profesional secara optimal;
- Keterbatasan dukungan pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran;
- Keterbatasan permodalan KDKMP, baik modal mandiri maupun modal pinjaman/penyertaan;
- Kurangnya keaktifan pengurus KDKMP dalam melakukan sosialisasi dan perekrutan anggota; dan
- Terdapat pengurus KDKMP yang memiliki pekerjaan utama, sehingga tidak bisa fokus dalam usaha KDKMP maupun kegiatan pendampingan ini.



Gambar 19. Pendampingan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terpilih di Wilayah IV, pada tanggal 6 Oktober-15 Desember 2025

2) Rapat Sosialisasi Pembuatan Akun Serta Pengisian Data Simkopdes Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Oktober 2025 dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Oktober 2025

- a. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan aplikasi SIMKOPDES kepada pengurus KDKMP di seluruh Provinsi NTB. Data Kementerian Koperasi per tanggal 13 Oktober diketahui baru sebanyak 590 (50,9%) Kopdeskel merah putih yang baru mengakses SIMKOPDES dari total 1.166 Kopdeskel merah putih yang ada di wilayah NTB
- b. Hal-hal yang dijelaskan oleh Tim Digitalisasi Kemenkop pada aplikasi SIMKOPDES adalah sebagai berikut:
- proses pembuatan akun SIMKOPDES;
 - pembuatan profil
 - pengisian potensi desa
 - proses penambahan dan verifikasi anggota
 - proses pengajuan rekening bank
 - proses pengajuan proposal bisnis
 - pemilihan paket kemitraan
 - dan hal-hal teknis lainnya.
- c. Pokok - pokok diskusi:
- Terdapat pergantian pengurus karena mengundurkan diri sehingga pengurus dapat segera berkoordinasi dengan Dinas Koperasi setempat untuk bisa mengganti pengurus di Aplikasi ODS
 - Masih terdapat sejumlah KDKMP yang belum menerima akta notaris dan dokumen AHU dari Dinas Koperasi
 - Masih terdapat KDKMP yang masih proses pengurusan NIB, NPWP dan no rekening koperasi
 - Sebagian KDKMP telah mendaftarkan akun, namun belum terverifikasi oleh Kemenkop.
 - Kesulitan untuk mengajukan menjadi agen LPG, karena keterbatasan kuota subsidi;
 - Kepemilikan gerai/kantor baik miliki sendiri atau sewa;
 - Belum adanya kejelasan informasi terkait pembagian zonasi untuk HIMBARA di Provinsi NTB; dan
 - Permohonan pengajuan kemitraan dengan pembiayaan perlu diperhatikan ketersediaan dana desa.

- d. Untuk dapat membangkitkan semangat para pengurus KDKMP di Provinsi NTB, akan dijadwalkan pertemuan *Success Story* dari Pengurus KDKMP di Provinsi NTT yang sudah mulai menjalankan usahanya dengan pembiayaan mandiri.



Gambar 20. Rapat Sosialisasi Pembuatan Akun Serta Pengisian Data Simkopdes Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Oktober 2025 dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Oktober 2025

3) Pembelajaran Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Wilayah NTT pada tanggal 22 Oktober 2025

- a. Dalam upaya mendorong percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Wilayah IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan pertemuan dalam rangka pembelajaran keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah NTT. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman antar-pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTT yang telah menjalankan usaha nyata, strategi pengembangan komunikasi antar koperasi, peluang kemitraan dengan BUMN dan lembaga keuangan, serta langkah-langkah untuk memperkuat struktur kelembagaan KDMP di seluruh wilayah NTT. Fokus utama pembelajaran keberhasilan tertuju pada Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura, Koperasi Kelurahan Merah Putih Penfui Timur dan Koperasi Desa Merah Putih Niki Niki.
- b. Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura
- Koperasi ini menjadi salah satu contoh keberhasilan awal KDMP di NTT. Dengan jumlah anggota sebanyak 387 orang, Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura tumbuh secara mandiri dari modal simpanan anggota.
 - Fokus utama koperasi adalah penyediaan bahan baku untuk MBG dan menjalin kerja sama erat dengan petani, peternak, dan nelayan setempat. Upaya koperasi dalam membangun jaringan dilakukan melalui pendekatan langsung ke seluruh MBG untuk menjamin ketersediaan pasokan.

- Koperasi Oepura berperan aktif dalam membantu nelayan melalui penyediaan sarana usaha dan akses pasar.
- Ciri khas koperasi ini adalah kemandirian finansial, yaitu tidak lagi mengharapkan bantuan kredit besar seperti skema Rp. 3 miliar, melainkan menekankan bahwa apabila usaha telah terbukti berjalan baik, pihak perbankan akan datang sendiri untuk menjalin kerja sama.
- Dukungan regulasi dan struktur kelembagaan membuat Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura mampu menjalin kerja sama eksklusif dengan berbagai pihak, termasuk BUMN seperti Bulog, BRI, dan Pertamina, sesuai arahan dan semangat Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025.

c. Koperasi Kelurahan Merah Putih Penfui Timur

- Sebelum diresmikan sebagai Koperasi Kelurahan Merah Putih, Penfui Timur telah berperan sebagai supplier bahan kebutuhan MBG, meskipun belum kontinyu karena belum semua MBG melakukan pembelian rutin. Dari sisi kelembagaan, KDMP Penfui Timur menunjukkan kemajuan signifikan.
- Struktur organisasi telah terbentuk lengkap, termasuk pembagian tugas promosi anggota dan kemitraan.
- Sudah memiliki *cold storage* kapasitas 5 ton, mendukung kegiatan pengolahan hasil perikanan.
- Telah membayar gaji pegawai selama tiga bulan terakhir, menunjukkan keberlanjutan aktivitas usaha.
- Tersedia profil sederhana dan buku pengurus sebagai dokumen kelembagaan.
- Memiliki omzet sekitar Rp.100 juta per bulan dari berbagai kegiatan usaha, termasuk pertanian dan penyediaan logistik.
- Pendanaan masih berasal dari simpanan anggota, tanpa pembiayaan luar, namun dukungan anggota—baik dari dalam maupun luar desa—cukup kuat.
- Koperasi juga membuka layanan sewa tenda, menyalurkan rekomendasi kredit anggota ke bank, serta melakukan identifikasi tenaga kerja untuk disalurkan ke pihak mitra.
- Ke depan, Penfui Timur membutuhkan penguatan kapasitas bisnis pengurus, pembelajaran usaha, serta peningkatan kemitraan agar dapat menembus pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

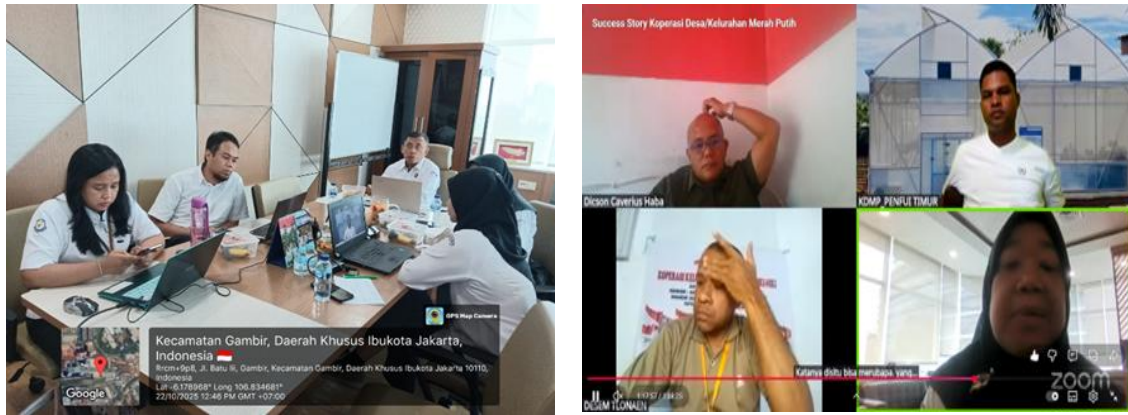
d. Koperasi Desa Merah Putih Niki Niki

- Koperasi ini terinspirasi dari KDMP Penfui Timur, dan menjadi salah satu Koperasi Desa Merah Putih contoh nyata inisiatif masyarakat yang berkembang cepat.
- Didirikan pada Mei 2025 dengan 206 anggota Sekitar 50% anggota merupakan pedagang pasar., koperasi ini beroperasi secara mandiri meski belum memiliki kantor tetap, dan memanfaatkan ruang di kantor kelurahan sebagai pusat kegiatan.
- Langkah awal mereka dimulai dengan koordinasi bersama Dinas Koperasi dan pihak kelurahan, Sosialisasi *door to door* di RT/RW untuk membangun pemahaman masyarakat dan rekrutmen pedagang pasar sebagai anggota dan penerima manfaat pinjaman.
- Koperasi ini telah menjalin kemitraan dengan Bank Mandiri menjadi agen Mandiri dengan komisi Rp10.000 per transaksi.
- Inovasi yang dijalankan antara lain menjual produk lokal seperti keripik dan dendeng di rest area menuju Timor Leste, menjadi peserta pameran produk daerah dan mengajak 16 tengkulak bergabung sebagai anggota koperasi, memperluas jaringan pemasaran.

e. Dari keseluruhan diskusi, beberapa isu strategis yang muncul antara lain:

- Diperlukan pelatihan manajemen usaha, pembukuan digital, dan strategi pemasaran untuk memperkuat profesionalisme koperasi.
- Hubungan dengan BUMN, perbankan, dan lembaga pendukung lain perlu diperluas guna menjamin keberlanjutan usaha koperasi.
- Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan berupa lahan atau gedung kantor koperasi, gudang, serta sarana rantai dingin (*cold chain*).
- Didorong pembentukan sistem komunikasi dan koordinasi antar koperasi (forum lintas KDMP) agar dapat saling memasok dan mendukung.

f. Dari kegiatan ini ditegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh komitmen, kepercayaan antar anggota, *sense of business* serta kreativitas dan inovasi pengurus danggota. Selain itu juga ditekankan pentingnya hubungan dengan pelaku usaha lokal dan pejabat pemerintah daerah.



Gambar 21. Pembelajaran Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Wilayah NTT pada tanggal 22 Oktober 2025

4) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kepada Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan Bekerja Sama dengan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO)

- a. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan telah dilakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kepada koperasi sektor kelautan dan perikanan terpilih bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO)
- b. Kegiatan ini bertujuan untuk:
 - Memperkuat kemampuan manajerial, termasuk perencanaan usaha, pencatatan keuangan, dan administrasi.
 - Memberikan skema pinjaman/pembiayaan untuk koperasi.
 - Memberikan peluang pembiayaan dan kemitraan sesuai kebutuhan koperasi dengan penyusunan proposal bisnis dan proposal pembiayaan.
- c. Daftar koperasi sektor kelautan dan perikanan yang didampingi adalah:
 - Pengurus Koperasi Konsumen Dermasandi Maju Bersama
 - Pengurus Koperasi Konsumen Mina Roso Lumintu
 - Pengurus Koperasi Konsumen Matsya Marine Raya
 - Pengurus Koperasi Konsumen Matsya Marine Raya Disingkat Matsmara
 - Pengurus Koperasi Konsumen Syariah Mina Sejahtera Bersama
 - Pengurus Koperasi Pemasaran Mina Teri Krispy
 - Pengurus Koperasi Produsen Mitra Pangan Nusantara
 - Pengurus Koperasi Produsen Samudera Jaya Bahari
 - Pengurus Koperasi Produsen Samudra Mandiri Sejahtera

- Pengurus Koperasi Konsumen Nelayan Bintan
- Pengurus Koperasi Sinar Laut Indah
- Pengurus Koperasi Nelayan Aru Mina Jaya
- Pengurus Koperasi Konsumen Perikanan Madani Abadi
- Pengurus Koperasi Produsen Mitra Usaha Langgeng Bersama
- Pengurus Koperasi Konsumen Pedagang Bahtera Kuningan
- Pengurus Koperasi Konsumen Abadi Guyub Bersama
- Pengurus Koperasi Pemasaran Bumi Kartini Mina
- Pengurus Koperasi Produsen Pengusaha Lauk Priyangan
- Pengurus Koperasi Produsen Berkah Mekar Bersama
- Pengurus Koperasi Konsumen Karya Berbudhy Sejahtera

d. Topik pelatihan

Tabel 9. Topik Pelatihan

No.	Tanggal	Topik	Narasumber
1.	4 November 2025	Cara Mengembangkan Ide Bisnis Koperasi - Sukses story - Pemetaan peluang usaha Kelautan dan Perikanan - Model bisnis koperasi perikanan	- Hery Sudarmono (Koperasi Agar Makmur Sentosa) - Julius Hendarta Rustandie (ASPPENDO)
2.	10 November 2025	Pembiayaan untuk Koperasi - Skema kredit untuk koperasi - Penyusunan laporan keuangan - Proposal bisnis dan pembiayaan	- Prama Priyahita (BRI) - Agustina Ari (ASPPENDO) - Julius Hendarta Rustandie (ASPPENDO)
3.	21 November 2025	Penyusunan Proposal Bisnis - Penyusunan profil koperasi - Penyusunan proposal bisnis - Penyusunan proposal pembiayaan	- Diana (ASPPENDO) - Erik Banjar (ASPPENDO) - Mei Yanti Nainggolan (ASPPENDO)
4.	26 November 2025	Presentasi Peserta - Proposal bisnis - Proposal pembiayaan	- Peserta

5.	3 Desember 2025	Strategi Kemitraan - Strategi peluang kemitraan pemasaran - Negosiasi dengan mitra bisnis	- Enggo Catur Srianto (Koperasi Sukses Inti Komoditas) - Hanifudin (ASPPENDO) - Mei Yanti Nainggolan (ASPPENDO)
----	-----------------	---	---

e. Kinerja koperasi sektor kelautan dan perikanan diukur sebelum dan sesudah dilakukan bimbingan teknis sebagai berikut:

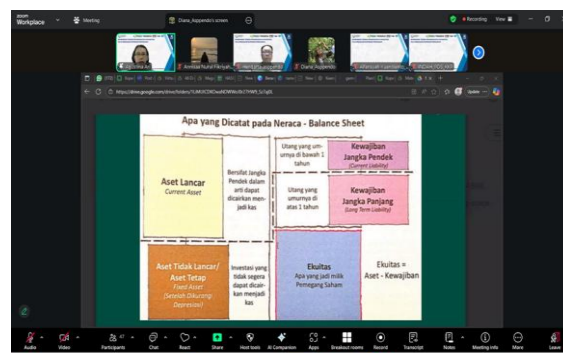
Tabel 10. Kinerja koperasi sektor kelautan dan perikanan

Nama Koperasi	Kelembagaan		Usaha		Lembaga Pendukung		Total		Persentase (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Mina Roso Lumintu	24	24	20	45	5	10	49	79	17,2%	27,7%
Pedagang Bahtera Kuningan	34	34	40	50	20	20	94	104	33%	36,5%
Karya Berbudhy Sejahtera	42	42	65	75	15	10	122	127	42,8%	44,6%
Mitra Pangan Nusantara	29	29	50	85	10	15	89	129	31,2%	45,3%
Matsya Marine Raya	52	52	45	95	10	10	107	157	37,5%	55,1%
Sinar Laut Indah	43	43	25	45	20	20	88	108	30,9%	37,9%
Berkah Mekar Bersama	30	30	50	85	10	15	90	130	31,6%	45,6%
Srikandi Trampil Mandiri	20	20	20	40	25	20	65	80	22,8%	28,1%
Pengusaha Lauk Priyangan	42	42	45	70	35	30	122	142	42,8%	49,8%
Dermasandi Maju Bersama	10	10	0	10	0	0	10	20	3,5%	7%
Syariah Mina Sejahtera Bersama	33	33	35	75	5	0	73	108	25,6%	37,9%
Mina Teri Krispy	24	19	55	65	0	10	79	94	27,7%	33%
Samudera Jaya Bahari	39	44	20	40	5	10	64	94	22,5%	33%
Samudera Mandiri Sejahtera	19	19	10	25	10	10	39	54	13,7%	18,9%

Konsumen Nelayan Bintan	28	23	15	55	15	15	98	93	20,4%	32,6%
Aru Mina Jaya	29	29	40	65	60	50	129	144	45,3%	50,5%
Madani Abadi	29	29	25	45	0	0	54	74	18,9%	26%
Mitra Usaha Langgeng Bersama	30	30	45	65	40	40	115	135	40,4%	47,4%
Abadi Guyub Bersama	48	48	40	70	0	0	88	118	30,9%	41,4%
Bumi Kartini Mina	29	29	35	45	40	40	104	114	36,5%	40%

Dari hasil pendampingan, koperasi perikanan menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif dari tahun 2024 ke 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, maupun dukungan program pembinaan yang memberikan dampak pada kinerja koperasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan koperasi perikanan menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi mengalami peningkatan kinerja yang nyata pada tahun 2025, dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,6%. Hasil ini dapat menjadi dasar untuk penajaman strategi pembinaan, di mana koperasi dengan kenaikan rendah memerlukan pendampingan lebih intensif, sedangkan koperasi dengan kinerja tinggi dapat diarahkan pada pengembangan skala usaha, akses pembiayaan, dan fasilitasi kemitraan.



Gambar 22. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kepada Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan Bekerja Sama dengan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO)

5) Identifikasi Kesiapan Pengelolaan Usaha Rantai Dingin di 5 (lima) Lokasi Prioritas KNMP

Sehubungan dengan penugasan kepada Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk melakukan pemetaan kesiapan KDMP sebagai pengelola KNMP dalam memanfaatkan sarana prasarana rantai dingin, telah dilakukan hasil pemetaan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemetaan dilaksanakan di 5 (lima) lokasi prioritas KNMP yaitu Ketapang – Lampung Selatan, Poncosari – Bantul, Aeng Batu Batu – Takalar, Sembulang – Batam dan Seraya Timur - Karang Asem. Pelaksanaan pemetaan berlangsung pada tanggal 25-28 November 2025 dan 2-5 Desember 2025.
- b. Kegiatan pemetaan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :
 - Identifikasi kesiapan KDMP dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana rantai dingin (pabrik es portable, cold storage portable, kendaraan berpendingin dan cool box);
 - Pertemuan dengan pengurus KDMP, anggota koperasi, penyuluh perikanan, dinas perikanan dan dinas koperasi untuk merumuskan model bisnis pengelolaan sarana prasarana rantai dingin; dan
 - Pemetaan peluang kemitraan antara KDMP dengan mitra usaha potensial di sekitar lokasi KNMP, seperti: pedagang pengumpul Unit Pengolahan Ikan, distributor, dan SPPG.
- c. Pengurus dan anggota KDMP memiliki keterbatasan dalam kapasitas, pengetahuan regulasi dan pengalaman terkait tata kelola dan manajemen usaha koperasi, khususnya usaha rantai dingin.
- d. Sebagian KDMP belum memiliki perizinan usaha penyediaan es (KBLI 35302)
- e. KDMP memiliki keterbatasan modal usaha dalam menjalankan unit usaha. Dalam operasionalisasi KDMP masih mengandalkan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota KDMP.
- f. Tiga koperasi telah menjalankan unit usaha wajib yaitu KDMP Aeng-aeng Batu yaitu usaha sembako dan klinik, KDMP Sembulang penyediaan gas, dan KDMP Poncosari sebagai agen pospay.
- g. Seluruh KDMP belum memiliki unit dan layanan usaha perikanan.
- h. KDMP memiliki keterbatasan informasi serta perluasan akses pasar dalam menjalankan unit usaha perikanan.
- i. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kesiapan KDMP untuk menjalankan bisnis rantai dingin yaitu :
 - KDMP yang berpotensi dapat menjalankan bisnis rantai dingin yaitu KDMP Seraya Timur dan Ketapang, karena memiliki potensi sumber bahan baku dan memiliki calon mitra potensial yang menyatakan siap menjadi off taker maupun mitra pengelola.

- KDMP yang membutuhkan upaya lebih untuk bisa menjalankan bisnis rantai dingin yaitu KDMP Sembulang, KDMP Aeng Batu-Batu dan KDMP Poncosari karena belum adanya kepastian bahan baku yang akan disimpan di cold storage.
 - Hasil tangkapan nelayan Desa Sembulang adalah ikan demersal (kerapu dan kakap), dan tidak memerlukan proses pembekuan karena langsung diserap pasar. Untuk itu perlu mendatangkan ikan dari luar Desa Sembulang, seperti dari Anambas. Sementara dari sisi calon mitra potensial/off taker terdapat pelaku usaha/pedagang pengumpul yang siap menerima ikan dari CS.
 - Hasil tangkapan nelayan Desa Aeng Batu Batu seluruhnya didaratkan di PPI Beba yang berjarak 5 km dari Desa Aeng Batu Batu, untuk itu diperlukan insentif agar nelayan Desa Aeng Batu Batu mau mendaratkan ikannya di CS. Sementara dari sisi off taker terdapat UPI (PT. Lontara Jaya Sakti, dan PT. Lintas Antar Nusa) yang siap menerima ikan dari CS.
 - Hasil tangkapan nelayan Poncosari cukup rendah dan langsung di serap oleh pasar lokal. Bahan baku usaha perikanan di Poncosari 70% berasal dari luar wilayah Bantul. Sehingga alternatif yang ditawarkan adalah menyimpan ikan dari luar Bantul untuk memenuhi kebutuhan pemasar ikan (warung kuliner) sekitar pantai pesisir Bantul. Peluang kemitraan dengan SPPG juga kecil, karena ikan yang diolah di dapur SPPG adalah jenis ikan air tawar, sementara UPI yang tersedia di Yogyakarta didominasi UPI skala mikro.
- j. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan usaha rantai dingin oleh KDMP diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:
- Bimbingan teknis dan pendampingan kelembagaan KDMP dalam rangka pengelolaan manajemen dan tata kelola usaha rantai dingin;
 - Pembinaan dan pendampingan dalam rangka penumbuhan pengembangan unit usaha;
 - Fasilitasi dan pendampingan perizinan berusaha dan sertifikasi dalam mendukung operasionalisasi usaha rantai dingin;
 - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi pengelolaan unit usaha dan operasionalisasi pengelolaan usaha rantai dingin;

- Fasilitas penajakan, temu usaha dan pendampingan dalam rangka pengembangan kemitraan usaha KDKMP dengan mitra usaha potensial, seperti BUMN untuk operasionalisasi unit bisnis wajib dan pelaku usaha perikanan untuk pengembangan usaha rantai dingin; dan
- Fasilitas informasi, promosi, akses pasar dalam rangka perluasan pasar hasil perikanan KDMP.



Gambar 23. Identifikasi Kesiapan Pengelolaan Usaha Rantai Dingin di 5 (lima) lokasi Prioritas KNMP

6) Pemetaan Kesiapan KDMP Pengelola KNMP di NTT pada tanggal 26-29 November 2025

- Kegiatan pemetaan dilaksanakan di 4 (empat) lokasi KNMP yaitu KDMP Sulamu – Kupang, Warloka – Manggarai Barat, Mudakeputu – Flores Timur, dan Adang – Alor yang bertujuan untuk untuk melakukan pemetaan kesiapan KDMP sebagai pengelola KNMP di NTT
- Kegiatan pemetaan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
 - Rapat koordinasi secara daring dengan Satgas Provinsi, Kab/Kota dan perwakilan BUMN;
 - Pertemuan dengan pengurus KDMP, anggota koperasi, penyuluh perikanan, dinas perikanan dan dinas koperasi untuk mendiskusikan model bisnis pengelolaan KNMP dan identifikasi kesiapan KDMP dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana; dan
 - Pemetaan peluang kemitraan antara KDMP dengan mitra usaha potensial di sekitar lokasi KNMP, seperti: pedagang pengumpul Unit Pengolahan Ikan, distributor, dan SPPG.
- Hasil rapat koordinasi dengan Satgas Daerah:

- Capaian KDKMP di NTT adalah 95,5% (akses Simkopdes) dari 13.626 unit di wilayah IV dan 22% (operasional min 1 gerai) dari 4.271 unit di wilayah IV. Ditargetkan Business Assistant dapat mempercepat penginputan simkopdes untuk 155 KDKMP;
- Potensi bisnis penyediaan minyak tanah atau BBM di Kopdeskel sangat potensial, namun supply masih belum memenuhi kebutuhan. Terdapat Empat KDKMP yang sudah dilayani oleh Pertamina yaitu adalah Penfui, Oepura, Nefonaek, dan Fatuketi;
- Perlu didorong kesepakatan/perjanjian kerjasama antara SPPG dengan KDKMP untuk mensupply kebutuhan bahan baku ikan di dapur SPPG;
- BRI telah menilai terhadap 202 koperasi yang memiliki potensi untuk operasional. Saat ini baru 2 KDKMP (Penfui Timur dan Fatuketi) yang telah bermitra sebagai agen BRILink. Kerjasama KDKMP dengan BRI cukup potensial, karena bisnis laku pandai ini tidak dikenakan biaya;
- KDKMP dapat menyediakan pelayanan starlink berbayar untuk lokasi yang tidak ada sinyal;
- PT. Pos siap mendukung KDKMP yang mengajukan layanan usaha penyedia jasa logistik, namun untuk pengiriman barang/paket yang kecil, karena untuk paket besar memerlukan infrastruktur tersendiri yang cukup kompleks. Deposit yang diperlukan minimal Rp 100 ribu. Kerja sama PT. Pos dengan KDMP telah berlangsung di Penfui Timur dan Nefonaek, namun aktivitas belum optimal;
- Beberapa syarat pokok bagi KDKMP yang ingin mengajukan SPBN yaitu tersedianya bangunan/sarpras (menggunakan drum), terdapat akses jalan, administrasi sesuai yang di persyaratkan (KBLI) dan tersedia permodalan (untuk pembuatan papan nama, dll); dan
- Bulog telah melakukan kerjasama dengan 12 KDKMP meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, TTS, dan Flores Timur, dengan nilai transaksi mencapai Rp1 miliar. Beberapa kendala masih ditemukan, terutama terkait tata kelola dan penyelesaian administrasi pada sejumlah koperasi.

d. Hasil identifikasi kesiapan KDMP dan rencana model bisnis:

- Pengurus dan anggota KDMP memiliki keterbatasan dalam kapasitas, pengetahuan regulasi dan pengalaman terkait tata kelola dan manajemen usaha koperasi;

- KDMP memiliki keterbatasan modal usaha dalam menjalankan unit usaha. Dalam operasionalisasi KDMP masih mengandalkan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota KDMP;
- Seluruh KDMP belum menjalankan unit usaha wajib dan belum memiliki unit dan layanan usaha perikanan;
- KDMP Mudakeputu, Flores Timur memiliki potensi operasionalisasi cold storage cukup besar karena selama ini hasil tangkapan ikan nelayan telah memenuhi standar dan kualitas untuk dijual dan ditampung di cold storage milik UPI setempat;
- KDMP Sulamu, Kupang belum memiliki rencana bisnis khususnya untuk pengelolaan bisnis rantai dingin. Pengurus KDKMP belum memutuskan untuk mengelola sarana prasarana sendiri atau bekerjasama dengan mitra. Pengurus juga belum memiliki calon *off taker*, namun memiliki keinginan untuk dapat memasarkan produk ikan ke Timor Leste;
- KKMP Adang, Alor optimis dapat mengoperasionalkan cold storage, dimana saat ini telah terdapat cold storage kapasitas 30 ton bantuan Ditjen PDS tahun 2018 operasional secara baik melalui mekanisme kerja sama Operasional dengan pihak swasta;
- KDMP Warloka dan Koperasi Kerapu Warlokasi Bersinar siap bekerja sama dalam pengelolaan bantuan KNMP Tahun 2025. Bentuk kerja sama selanjutnya akan di musyawarahkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama (PKS). KDMP Warloka akan menjalin kerja sama dengan KDMP-KDMP di desa pesisir yang berada di sekitar Desa Warloka untuk dapat melayani kebutuhan nelayan dari hasil operasionalisasi bantuan KNMP di desa Warloka.

e. Hasil identifikasi peluang kemitraan:

- Lima UPI di Kota Kupang bersedia menjadi off taker sepanjang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan UPI. Masing-masing UPI di Kupang memiliki kebutuhan bahan baku berbeda, untuk PT. Matsyaraja Arnawa Stambhapura membutuhkan bahan baku ikan demersal dan loin tuna, PT. Era Mandiri Cemerlang membutuhkan jenis ikan seperti tuna, kerapu, gurita dan Komira menerima semua jenis ikan;
- UPI mengusulkan pola kemitraan di mana permodalan nelayan sepenuhnya dikelola oleh Koperasi Nelayan Merah Putih. Dengan demikian, hasil tangkapan

dari nelayan akan disetorkan terlebih dahulu ke KDMP sebagai mitra koperasi, dan selanjutnya koperasi yang akan melakukan penjualan ikan kepada UPI. Skema ini memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan pemenuhan kewajiban nelayan dilakukan melalui Koperasi, sehingga perusahaan tidak berhadapan langsung dengan nelayan dalam aspek pembiayaan maupun penagihan;

- Sebagai bagian dari kemitraan, perusahaan siap memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan penanganan dan pengolahan ikan yang baik (*Good Handling Practices*), guna memastikan kualitas ikan yang dikirim ke perusahaan sudah sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - UPI di Flores Timur (PT. Pahala Bahari) memproduksi loin tuna dan ikan beku lainnya. PT. Pahala Bahari selaku pemasok bahan baku ikan dalam bentuk beku ke pabrik di Cikarang (*End Product*), kemudian diekspor ke Eropa, Asia dan Amerika. Jenis ikan adalah ikan cakalang, baby tuna, deho, layang, tembang, selar, banjar, kembung dan bobara/kue. PT. Pahala Bahari menyambut baik dan membuka lebar kemitraan dengan KDMP dimana UPI akan menerima ikan yang didatangkan dari KDMP selama memenuhi persyaratan; dan
 - SPPG menyambut baik kemitraan dengan KDMP untuk memasok ikan. Kota Kupang memiliki 12 SPPG sementara Flores Timur dan Alor masing-masing memiliki 7 SPPG. Kunjungan ke SPPG di Flores Timur yaitu Fortuna Wayhali telah memasukkan ikan di menu MBG, salah satunya adalah ikan lele yang berasal dari Pokdakan Lolon Girek Jaya, Desa Blepanawa, sedang SPPG Ile Mandiri I belum memasukkan ikan di menu MBG karena harga ikan laut seperti ikan tuna cukup tinggi. Kunjungan ke SPPG OeBobo di Kota Kupang, sudah terdapat 1 (satu) kali menu ikan dalam seminggu, dengan kebutuhan sebanyak 220 kg per minggunya. Mahalnya harga ikan menyebabkan menu ikan terbatas, harga fillet tuna mencapai Rp70.000 per kg.
- f. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan usaha rantai dingin oleh KDKMP, hal-hal berikut perlu diperhatikan:
- Peran Penyuluh Perikanan untuk dapat mengakselerasi kesiapan kelembagaan pengelola di kawasan KNMP dan mempersiapkan model bisnis yang tepat dengan dibantu kehadiran TPPM-KNMP;

- Diperlukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan unit usaha perikanan; dan
- Fasilitasi peninjauan, temu usaha dan pendampingan dalam rangka pengembangan kemitraan usaha KDKMP dengan mitra usaha potensial (UPI, SPPG dan lembaga Pembiayaan).



Gambar 24. Pemetaan Kesiapan KDMP Pengelola KNMP di NTT pada tanggal 26-29 November 2025

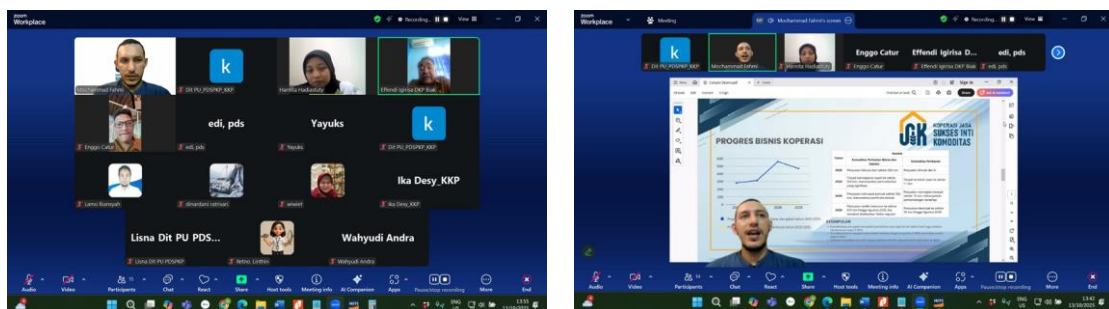
Untuk mendukung pengembangan usaha lembaga diperlukan dukungan berupa fasilitasi kemitraan usaha. Fasilitasi kemitraan usaha ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

1) Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dengan Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik pada tanggal 13 Oktober 2025

- Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas memiliki usaha di bidang perdagangan hasil perikanan yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo. Koperasi ini membutuhkan sekitar 3.000 ton ikan per tahun, dengan jenis komoditas yang dibutuhkan diantaranya kerapu, kakap, kakak tua, baronang dan ikan buaya. Selain dipasarkan di dalam negeri, Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas memasarkan produknya ke luar negeri dengan bekerjasama dengan PT. Beejay Seafood. Sementara Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik merupakan produsen ikan karang yang berlokasi di Bosnik Kabupaten Biak Numfor.
- Dinas KP Biak Numfor menyambut baik rencana kemitraan dan merekomendasikan kepada calon *offtaker* untuk dapat membeli ikan karang dan

pelagis, karena jika hanya spesifik ikan karang maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kuota 1 kontainer. Kendala lain yang akan dihadapi dalam implementasi kemitraan ini adalah tidak adanya sarana rantai dingin di Bosnik sehingga dapat menurunkan kualitas ikan.

- c. Dalam rangka kemitraan jangka panjang, Dinas Perikanan Biak Numfor mengharapkan Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dapat berinvestasi di Biak Numfor dengan membangun *Cold Storage* untuk menampung produksi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Bosnik. Sementara untuk jangka pendek Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dapat memanfaatkan *cold storage* yang ada di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri. Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor akan berdiskusi lebih lanjut kepada Koperasi Kalamo Biak.
- d. Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas akan melakukan identifikasi ke Kabupaten Biak Numfor, sekaligus bertemu langsung dengan Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik dengan didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor



Gambar 25. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dengan Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik pada tanggal 13 Oktober 2025

2) Identifikasi Potensi Kemitraan Koperasi Perikanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 30 Oktober 2025

Dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Pusat Penyuluhan KP mengadakan pertemuan dengan Koperasi Perikanan untuk mengidentifikasi potensi kemitraan dengan Koperasi Desa/Kelurahan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Koperasi perikanan menyambut baik rencana kemitraan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, karena saat ini program Pemerintah terfokus

kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat menjadi peluang dalam pengembangan bisnis.

- b. Sejumlah Koperasi Perikanan menawarkan model kemitraan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diantaranya berperan sebagai *off taker* (pembeli ikan, kepiting dan rumput laut) atau sebaliknya menjadi suplier bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah bermitra dengan dapur SPPG. Secara detail potensi kemitraan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11. Tabel Potensi Kemitraan

No	Nama Koperasi	Provinsi	Kab/Kota	Usaha Koperasi	Potensi Kemitraan	Ket
1	Koperasi Mina Berkah Lestari	Jawa Timur	Banyuwangi	Pengolahan hasil perikanan dan Kuliner	Menjadi offtaker hasil penangkapan sebagai bahan baku	• Memiliki Cold storage dan Mobil berpendingin; • Membutuhkan pelatihan pengawetan sambal cumi
2	Koperasi Mina Bahari Bersama	Jawa Timur	Banyuwangi	Budidaya Udang	Menjadi supplier pangan untuk KDMP	Membutuhkan Cold storage
3	Koperasi Bintang Jaya Sejahtera	Jawa Timur	Blitar	Pengolahan fillet/beku patin dan lele	Menjadi supplier ke MBG fillet patin dan lele	Membutuhkan Cold storage
4	Koperasi Bahari Indah Perkasa	Jawa Timur	Pasuruan	Supplier Ikan Laut	Menjadi offtaker ikan laut dari KDMP	Membutuhkan Permodalan
5	Koperasi Duta Samudera Jaya	Jawa Timur	Jember	Penangkapan, Budidaya, Pemasaran Ikan	Menjadi supplier produk pangan ke KDMP	Bersedia menjadi pengelola Cold storage di Kec.Kuker
6	Koperasi Lancar Berkah Bahari	Jawa Timur	Banyuwangi	Usaha transportasi, perkapalan, TPI, dan pabrik es	Menjadi offtaker hasil tangkapan	Membutuhkan permodalan dan Penerima Kendaraan berpendingin
7	Koperasi Guyub Makmur Bersama	Jawa Timur	Probolinggo	Usaha pengolahan ikan, snack ikan	Menjadi supplier snack ikan	Membutuhkan akses pemasaran
8	Koperasi Sumber Rezeki Sejahtera	Jawa Timur	Kota Surabaya	Usaha budidaya kepiting soka dan bakau	Membutuhkan bahan baku kepiting hidup	Membutuhkan permodalan
9	Koperasi Agar Makmur Sentosa	Jawa Timur	Sidoarjo	Usaha Rumput Laut Gracilaria	Membutuhkan rumput laut cottonii dan sargassum	Ekspor rumput laut gracilaria ke China

No	Nama Koperasi	Provinsi	Kab/Kota	Usaha Koperasi	Potensi Kemitraan	Ket
10	Koperasi Bahtera Mandiri Sejahtera	NTB	Sumbawa	Budidaya Lobster dan Ikan Air Tawar	Menjadi Offtaker hasil produksi ikan KDMP atau nelayan	Membutuhkan Alat Tangkap
11	Koperasi Laut Biru	NTB	Sumbawa	Usaha Garam	Menjadi supplier garam ke KDMP dan MBG	
12	Koperasi Tahu Tempe dan Garam	NTB	Bima	Usaha Garam	Menjadi suplier garam ke KDMP dan Kelompok Ikan Asin di Cilincing	Membutuhkan permodalan dan akses pasar; Penerima Pabrik Pencucian Garam dan Gudang Garam
13	Koperasi Mata Mara Dahi	NTT	Sumba Timue	Usaha Rumput Laut Cotonii	Menerima rumput laut cottonii dari KDMP	Membutuhkan permodalan

- c. Sebagian besar koperasi perikanan menyampaikan bahwa keterbatasan permodalan dan akses pemasaran menjadi masalah utama dalam pengembangan bisnis koperasi.
- d. Terdapat koperasi perikanan (Koperasi Konsumen Nelayan Duta Samudra Jaya) yang siap mengelola gudang beku terintegrasi di Kabupaten Jember, dan membutuhkan fasilitasi kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Jember.
- e. Perlu dilakukan identifikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dapat memasok komoditas yang dibutuhkan oleh koperasi perikanan dan Ditjen PDSPKP dapat melakukan fasilitasi pertemuan antara koperasi dengan lembaga pembiayaan untuk dapat mengakses permodalan



Gambar 26. Identifikasi Potensi Kemitraan Koperasi Perikanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 30 Oktober 2025

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja kelembagaan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp. 123.321.768,- atau setara dengan 99,98% dari total pagu sebesar Rp. 123.346.000,- .

3) Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program dan Kemitraan Usaha

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Nilai realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan adalah nilai realisasi pembiayaan yang berasal dari 2 jenis data penyaluran kredit, yaitu:

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Data realisasi KUR dimonitor secara berkala melalui Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan yang diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan, baik subsektor hulu maupun hilir.

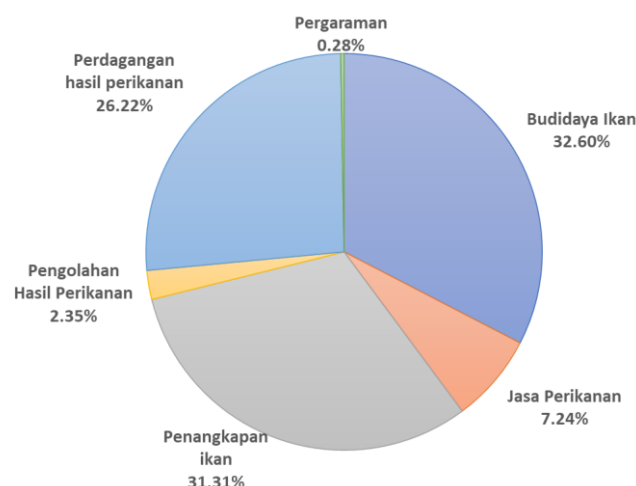
b. Kredit Ultra Mikro (Kredit UMi)

Data realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) diperoleh secara berkala dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Pegadaian sebagai lembaga non bank yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Direktorat pemberdayaan usaha terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan sosialisasi dan literasi keuangan.

Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2025 sebesar Rp. 7,45 Triliun kepada 337.537 Debitur yang terdiri atas Rp. **6,23** Triliun kepada **120.735** Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. **1,21** Triliun kepada **216.802** Debitur bersumber dari Kredit Umi. Capaian nilai pembiayaan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar - 4,11%.

Realisasi nilai kredit program apabila di bandingkan per sektor usaha kelautan dan perikanan maka pada sektor usaha budidaya terealisasi sebesar 32,60% atau Rp2,43 Triliun kepada 101.764 debitur; sektor penangkapan ikan terealisasi sebesar 31,31% atau Rp2,33 Triliun kepada 182.472 debitur; sektor perdagangan kelautan dan perikanan sebesar 26,22% atau Rp1,95 Triliun kepada 38.557 debitur, sektor jasa perikanan sebesar 7,24% atau Rp0,53 Triliun kepada 11.600 debitur; sektor pengolahan perikanan sebesar 2,35% atau Rp0,17 Triliun kepada 2.963 debitur dan sektor pergaraman sebesar Rp0,28 Triliun kepada 161 debitur.



Gambar 27. Gambar Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV untuk mendukung capaian tersebut adalah :

1. **Rapat koordinasi kelompok kerja kredit program sektor kelautan dan perikanan triwulan III**

Dalam rangka akselerasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui Kredit Program dan sinergi kegiatan antar anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 16 Oktober 2025 diselenggarakan rapat Pokja Kredit Program Triwulan III secara daring dan luring, dengan hasil sebagai berikut :

- Rapat dihadiri oleh anggota Pokja lingkup KKP yaitu perwakilan dari Sekretariat Jenderal KKP, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi daya dan BRSDMKP, serta perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian dan lembaga keuangan yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BSI, PT.PNM, dan PT.Pegadaian;
- Total realisasi Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III 2025 sebesar Rp5,62 Triliun yang disalurkan kepada 256.098 debitur, atau setara dengan 70,44% dari target nilai pembiayaan 2025 sebesar Rp7,99 Triliun. Secara *year on year* nilai realisasi pembiayaan menurun 8,16%, dan jumlah debitur meningkat 13,44%;
- Hingga Triwulan III 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melakukan kegiatan fasilitasi pembiayaan dengan melibatkan lembaga keuangan, antara lain bersama:
 - BRI di Trenggalek merealisasikan kredit sebesar Rp1,5 miliar, dan mengusulkan Desa Nglebeng masuk dalam program desa Brilian sebagai binaan BRI, dan tahap verifikasi data 11 pengelola bantuan gudang beku KKP sebagai calon debitur;
 - Bank Mandiri di TPI Kalibaru Cilincing merealisasikan kredit sebesar Rp250 juta, dan tahap verifikasi pinjaman dari Koperasi di Cilincing senilai Rp500 juta, dan telah merealisasikan kredit senilai Rp250 juta kepada 2 orang pengelola gudang beku di Subang dan Karawang;
 - BNI dalam proses pendampingan dan kurasi UKM yang berpotensi ekspor, dan telah mengikutsertakan 1 UMKM dalam BNI Expo.
- Dalam upaya peningkatan realisasi KUR, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian melalui usulan relaksasi kebijakan skema KUR khusus sektor kelautan dan perikanan. Usulan ini dapat disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Sebagai bentuk dukungan program prioritas KKP, lembaga keuangan membutuhkan informasi yang lebih detail untuk sebaran lokasi KNMP dan KDMP pengelola, serta perhitungan nilai dan potensi bisnis yang ada di setiap lokasi KNMP. Sementara itu, data potensi sebaran lokasi dan hitungan bisnis usaha

produksi garam akan disiapkan lebih lanjut oleh Direktorat Sumberdaya Kelautan untuk dapat difasilitasi akses permodalannya oleh lembaga keuangan.

2. Fasilitasi akses Pembiayaan

Fasilitasi akses pembiayaan telah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Identifikasi dan verifikasi kebutuhan pembiayaan terhadap 13 (tiga belas) Pengelola Gudang Beku Bantuan Pemerintah yang diusulkan oleh Direktorat Logistik, dengan kriteria telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS), melalui pengisian *form* daring UMKM Potensial serta Pelaku usaha Perikanan berbasis Komunal di Trenggalek,
- Sosialisasi literasi dan akses pembiayaan bersama Bank BRI kepada 13 (tiga belas) Pengelola Gudang Beku Bantuan Pemerintah, yang dilaksanakan secara daring melalui media *Zoom Meeting*. Materi sosialisasi meliputi pemahaman skema pembiayaan perbankan/KUR, persyaratan kredit, serta penguatan aspek kelayakan usaha.
- Penyampaian hasil verifikasi UMKM Potensial kepada lembaga keuangan, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri, sebagai dasar bagi lembaga keuangan untuk melakukan verifikasi lanjutan dan mempertimbangkan pemberian pembiayaan sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing UMKM.
- Pemantauan dan koordinasi berkala melalui rapat koordinasi monitoring dengan Bank BRI dan Bank Mandiri, untuk memperoleh informasi perkembangan realisasi pembiayaan hasil fasilitasi serta mengidentifikasi kendala dalam proses penyaluran pembiayaan kepada UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Hasil Fasilitasi

Tabel 12. Hasil Fasilitasi

Lembaga Keuangan	Kegiatan	Lokasi	Progres Fasilitasi Pembiayaan
Bank Indonesia	Fasilitasi <i>Business Matching</i> dengan Lembaga Keuangan	Lampung	1 UMKM terealisasi pembiayaan sebesar Rp.100 Juta an Fatih Kuliner melalui program PUMK – BRI dan 2 UMKM dalam progress untuk realisasi dengan potensi pembiayaan Rp.250 Juta.

Lembaga Keuangan	Kegiatan	Lokasi	Progres Fasilitasi Pembiayaan
Bank BNI	Fasilitasi pembiayaan dan pembinaan UMKM KP	Pacitan	KKP telah memberikan data UMKM Potensial melalui Link UMKM Go Global 1 UMKM telah diikutsertakan dalam BNI Expo an. Alsafood
Bank Mandiri	Fasilitasi akses pembiayaan	Kab. Garut dan Kota Jakarta Utara	9 UMKM terealisasi Pembiayaan sebesar Rp.520 Juta
Bank Mandiri	Fasilitasi Pembiayaan pengelola gudang beku	Subang	Telah terealisasi pembiayaan sebesar Rp.200 Juta
Bank Mandiri	Pembinaan UMKM melalui Bimtek UMKM Menuju Pasar Global	Garut dan Palembang	Sebanyak 4 UMKM telah berhasil melakukan ekspor ke Hongkong dan 6 UMKM siap ekspor
Bank BRI	Fasilitasi pembiayaan 11 UMKM KP di Desa Nglebeng	Kecamatan Panggul, Trenggalek	8 UMKM terealisasi pembiayaan sebesar Rp.1,86 Milyar dan telah terbentuk 1 ekosistem bisnis desa brilian di nglebeng Trenggalek
Bank BRI	Fasilitasi Pembiayaan pengelola gudang beku dan SRG (updating Pelaksanaan Program SRG Komoditas Perikanan)	11 Titik	1 UMKM terealisasi pembiayaan sebesar Rp.500 Juta, dan sebanyak 3 UMKM masih dalam proses dengan potensi pembiayaan Rp.1,6 Milyar

3. Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Pemanfaatan KUR

1. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pemanfaatan KUR sektor kelautan dan perikanan, tidak hanya dari sisi besaran penyaluran, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan omzet, aset, produksi, tenaga kerja, dan pemasaran.

2. Analisis mencakup penerima KUR tahun 2024–2025, dengan pengambilan data di 15 lokasi intervensi Direktorat Pemberdayaan Usaha, yaitu Kab. Garut, Bogor, Bekasi, Gresik, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek, Badung, Tabanan, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kupang, Kota Jakarta Utara, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Dan Kota Kupang.
3. Responden yang menjadi sasaran adalah UMKM penerima KUR di lokasi sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui *Google Form* yang didistribusikan oleh lembaga keuangan penyalur KUR selama periode 1 November hingga 31 Desember 2025. Mekanisme pendataan menetapkan masing-masing bank untuk menyediakan sepuluh debitur per lokasi, sehingga total target mencapai 750 responden. Aspek penilaian yang dilakukan meliputi : Omset, Aset, Jumlah tenaga kerja, Produksi, Perluasan Pasar. Pendekatan ini memastikan analisis yang dihasilkan mencerminkan kondisi aktual pelaku usaha dalam memanfaatkan KUR.
4. Adapun keragaan data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
 - a. Hingga 1 Desember 2025, terkumpul 430 responden atau 57,33 persen dari target 750 debitur, dengan total nilai pencairan sebesar Rp45,06 miliar;
 - b. Dari jumlah tersebut, 254 debitur merupakan penerima KUR tahun 2024 dan 176 debitur tahun 2025;
 - c. Distribusi responden menurut penyalur menunjukkan Bank Mandiri sebagai kontributor terbesar dengan 260 debitur, diikuti oleh Pegadaian sebanyak 85 debitur, BNI 68 debitur, dan BSI 17 debitur, sementara BRI tidak menyampaikan data sampling; dan
 - d. Data ini memberikan dasar yang memadai untuk analisis lebih lanjut, meskipun terdapat perbedaan kontribusi antar bank penyalur.
5. Hasil analisa monev pemanfaatan dan dampak KUR sektor KP adalah sebagai berikut :
 - a. Dari total realisasi Rp 45.058.100.000,-, Sektor usaha budidaya memiliki persentase terbesar yaitu 52,17%, kemudian usaha pemasaran 30,50%, penangkapan 6,41%, pengolahan 6,01% dan jasa perikanan 4,92%;
 - b. Analisis penyaluran KUR menunjukkan bahwa 99,06 persen debitur memanfaatkan pembiayaan sesuai dengan proposal pengajuan, yaitu untuk

kebutuhan modal kerja, pengadaan sarana dan prasarana, serta penambahan atau perluasan gedung dan lahan; dan

c. Penilaian keberhasilan Program KUR dilakukan dengan mengukur dampaknya terhadap lima aspek utama usaha, yaitu peningkatan aset, omzet, produksi, tenaga kerja, dan perluasan pemasaran, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kategori UMKM Sangat Berhasil (42%)
Sebanyak 180 UMKM mengalami peningkatan di semua 5 aspek (omzet, aset, produksi, tenaga kerja, dan pemasaran). Kelompok ini menunjukkan pemanfaatan KUR yang paling optimal.
- Kategori Berhasil (34%)
Sebanyak 147 UMKM menunjukkan perkembangan yang kuat dengan peningkatan pada 4 aspek. Umumnya, peningkatan terjadi pada omzet, aset, volume produksi, dan jangkauan pemasaran.
- Kategori Cukup (19%)
83 UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah menerima KUR. Artinya, program ini mampu mendorong peningkatan usaha di 3 aspek, meskipun belum mencapai hasil optimal.
- Kategori kurang berhasil (5%)
20 UMKM yang belum merasakan manfaat optimal dari KUR, Hal ini terlihat dari peningkatan yang terbatas pada hanya 1–2 aspek, kemungkinan terkait kondisi usaha yang belum stabil atau pemanfaatan modal yang belum maksimal.

4. Kurasi Produk Kelautan Perikanan

Merupakan akumulasi dari perbandingan antara jumlah UMKM yang produknya telah terkurasi yang mendapat pelatihan / pendampingan dari unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP dengan keseluruhan UMKM yang telah dikurasi produknya pada tahun yang sama. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan GBPP, Kurikulum dan Penyusunan Modul Kurasi serta Sosialisasi Kurasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kurasi Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai upaya peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan dua kegiatan, yaitu Penyusunan Modul Kurasi Usaha pada tanggal 29 Oktober 2025 dan Sosialisasi Kurasi Usaha UMKM Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- Pembahasan Penyusunan GBPP, Kurikulum, dan Modul Pelatihan Kurasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipimpin oleh ketua tim kerja kurasi usaha, dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Perangkat Pelatihan dan Corporate University (CORPU), perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha serta anggota Tim Kerja Kurasi Usaha;
- Pembahasan sosialisasi kurasi usaha meliputi pengertian, manfaat, tujuan, mekanisme dan aspek-aspek kurasi usaha serta peranan dan tugas kurator oleh tim kerja Kurasi Usaha. Selain itu disampaikan pula pelaksanaan UMKM naik Kelas dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan oleh Ditjen PDSPKP terhadap aspek - aspek usaha yang dibutuhkan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha;
- Poin- poin hasil diskusi :
 - Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kurasi Usaha Kelautan dan Perikanan diperlukan beberapa hal meliputi penyusunan GBPP, Kurikulum dan Modul Kurasi UMKM, penyiapan kuesioner kurasi, pengembangan sistem input, analisis, dan penyajian data kurasi, pelaksanaan konsolidasi hasil kurasi, penyusunan rekomendasi pembinaan dan pemanfaatan hasil kurasi bagi unit kerja terkait, serta peningkatan kapasitas kurator melalui pelatihan dan sertifikasi calon kurator di tingkat pusat dan daerah;
 - Pelaksanaan kurasi dapat dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas dan kesiapan sumber daya di wilayah masing-masing. Data UPI yang digunakan dalam kegiatan kurasi mengacu pada data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan database KUSUKA tetapi juga dapat berasal dari usulan masing-masing daerah; dan
 - Peserta pelatihan kurator tidak dibatasi hanya bagi ASN Pusat melainkan dapat berasal dari ASN Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun penyuluh yang secara resmi ditugaskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau Kabupaten/Kota

2. Penyusunan Kuesioner Kurasi Usaha

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kurasi usaha UMKM kelautan dan perikanan, diperlukan instrumen penilaian yang tepat dan terukur sebagai dasar rekomendasi UMKM naik kelas. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan rapat penyusunan kuesioner kurasi usaha pada tanggal 25 November 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Pelatihan BRSDMKP, Katimja Data dan dan Pelayanan Publik, Direktolar Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengolahan dan perwakilan timja direktorat Pemberdayaan Usaha;
- Kuesioner disusun dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan dan meliputi enam aspek kurasi yaitu Legalitas, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Produksi, Manajemen Operasional dan Pemasaran;
- Penyempurnaan kuesioner juga mengakomodir kebutuhan data dari kegiatan UMKM Naik Kelas Serta Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan Menggunakan Moda Transportasi Kereta Api. Selain itu, dilakukan penambahan informasi pada profil UMKM serta perbaikan beberapa pertanyaan agar lebih relevan dengan kebutuhan kurasi usaha UMKM kelautan dan perikanan, menggantikan pendekatan sebelumnya yang lebih berfokus pada kurasi produk;
- Pengisian kuesioner oleh kurator akan dilakukan langsung melalui aplikasi Spartan pada tautan <https://spartan.pdspkp.id/> sebagai pengganti sistem sebelumnya yang menggunakan Google Drive. Penggunaan Google Drive hanya dipertahankan untuk kebutuhan penyimpanan dokumen; dan
- Tim Kerja Data dan Pelayanan Publik berperan sebagai eksekutor pelaksanaan pembaruan sistem spartan, sementara tim kerja teknis bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyiapan alur proses bisnis. Spartan yang sebelumnya tidak aktif sudah dapat dioperasikan kembali dan digunakan. Ditekankan pula perlunya penyandingan antara tampilan dan fungsi Spartan versi lama dan versi baru, termasuk proses konversi skor dari

sistem kuesioner sebelumnya ke format baru agar tetap konsisten dan valid dalam penilaian.

3. Finalisasi Penyusunan Kuesioner Kurasi Usaha

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kurasi usaha UMKM kelautan dan perikanan, diperlukan instrumen penilaian yang tepat dan terukur sebagai dasar rekomendasi UMKM naik kelas. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan rapat finalisasi penyusunan kuesioner kurasi usaha pada tanggal 18 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pemasaran, Direktorat Prasarana dan Sarana, Setdtjen PDSPKP, Pusat Pelatihan BPPSDMKP dan perwakilan timja direktorat Pemberdayaan Usaha;
- Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan sebelumnya, dengan agenda utama penyempurnaan dan finalisasi kuesioner kurasi usaha;
- Penyempurnaan kuesioner meliputi beberapa aspek yaitu aspek produksi, sumberdaya manusia, pemasaran, operasional dan rekomendasi pembinaan dan pelatihan . Selain itu, dilakukan penambahan informasi pada kolom keterangan, perbaikan redaksi sejumlah pertanyaan, serta penyesuaian pilihan jawaban agar lebih jelas dan sesuai kebutuhan data;
- Hasil Pembahasan Finalisasi Penyusunan Kuesioner Kurasi Usaha :
 - Aspek Produksi :

Perubahan pilihan dari Ikan Hidup, Ikan Segar, dan Ikan mati menjadi Bahan baku hidup, bahan baku segar, dan bahan baku mati. Olahan intermediate diubah menjadi bahan baku setengah jadi/ intermediate produk berikan contoh bahan baku intermediate seperti surimi dan rumput laut kering;

Perubahan Sub aspek kurasi “Asal bahan baku utama” diubah menjadi pilihan Lokal: Kabupaten/ Kota, dan pilihan lainnya adalah impor: negara asal;

Sub aspek Jumlah kebutuhan bahan baku per tahun (kg) dan sub aspek kebutuhan volume bahan baku ikan per tahun (kg) diubah menjadi rata-rata kebutuhan bahan baku per bulan dan kebutuhan rata-

rata volume bahan baku per bulan (kg) dan unsur pilihannya diubah menjadi isian bebas;

Sub aspek kapasitas produksi terpasang pertanyaannya diubah menjadi berapa kapasitas maksimal produksi per bulan (kg). Sub aspek Utilitas produksi dihitung secara langsung oleh curator;

Perubahan sub aspek berapa aset usaha menjadi berapa nilai aset yang mendukung usaha anda. Aset tidak termasuk tanah dan bangunan; dan

Penambahan keterangan tambahan bahan pangan, mengacu pada peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019. Tambahan yang dimaksud antara lain garam, penyedap rasa, pengental, dan pengawet. Sedangkan untuk bahan penolong yakni air dan es.

- Aspek Sumber Daya Manusia :

Pada unsur aspek tenaga kerja ditambahkan unsur pernyataan mengenai kecukupan tenaga kerja terhadap kebutuhan produksi, disertai kewajiban mencantumkan jenis pelatihan yang telah diikuti apabila dinyatakan mencukupi;

- Aspek Pemasaran Pada aspek pemasaran dilakukan penambahan penjelasan pada tujuan pemasaran dengan mencantumkan wilayah tujuan secara rinci, serta penambahan contoh target pemasaran luar rumah tangga, seperti restoran, katering, hotel, SPPG, dan sejenisnya;
- Operasional Pada aspek operasional, penulisan subaspek penyimpanan bahan baku diubah menjadi penyimpanan produk akhir, serta subaspek sarana pengiriman disesuaikan menjadi jenis moda transportasi yang digunakan dalam pendistribusian produk, dengan penambahan pilihan moda darat berupa kereta api atau kendaraan lainnya;

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

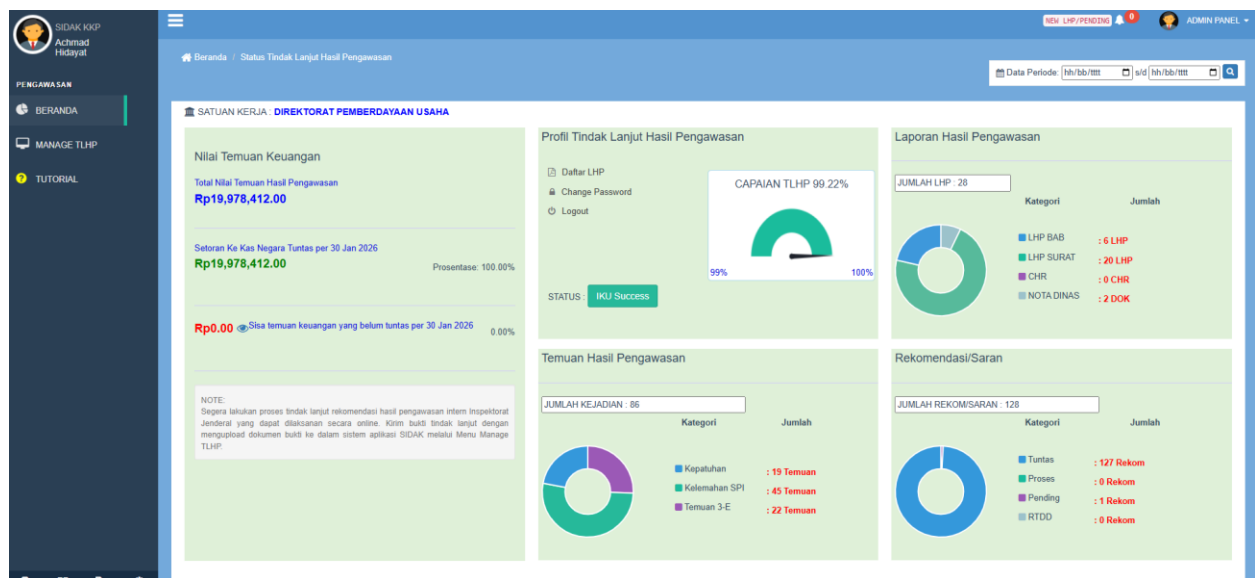
IK3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK pada Triwulan IV 2025, Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan IV. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2025 yang telah diselesaikan secara Tuntas dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW IV terhadap target 2025
	TW IV 2025	TW IV 2024	TW III 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	TW III 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	Tahun 2024	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95	80	80	95	100	100	100	100	105,26	125	125	105,26



Gambar 28. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Desember 2025

IK4. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 100. Capaian indikator persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan usaha adalah 100% atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2025 yakni 100%. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 100% atau setara 100% dari target 100%, maka realisasi tahun 2025 baik realisasi maupun capaiannya tidak mengalami pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% atau setara 100% dari target 100%, maka realisasi tahun 2025 baik realisasi maupun capaiannya tidak mengalami pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 75% atau setara 100% dari target 75%, maka realisasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 25%,

sedangkan capaiannya tidak mengalami pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 75% atau setara 100% dari target 75%, maka realisasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 25%, sedangkan capaiannya tidak mengalami pertumbuhan.¹⁰

Tabel 14. Capaian Penyelesaian Temuan BPK pada Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	Capaian (%)
1.	Sekretariat Ditjen PDSPKP	0	0	100
2.	Direktorat Prasarana dan Sarana	0	0	100
3.	Direktorat Pemberdayaan Usaha	0	0	100
4.	Direktorat Pengolahan	64.069.530,94	64.069.530,94	100
5.	Direktorat Pemasaran	0	0	100
6.	Direktorat Akses dan Promosi	0	0	100
7.	BBP3KP	0	0	100
		64.069.530,94	64.069.530,94	100

IK5. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		Persentase Realisasi terhadap target 2025
	TW IV 2025	TW IV 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	s.d TW I 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75	75	75	86,69	82,33	86,69	115,58	109,77	115,58

Capaian indikator nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah 86,69 atau setara dengan 115,58% terhadap target tahun 2025 yakni 75. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 75, maka realisasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 15,58. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 82,33 maka realisasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,29%.

1. Hasil Monitoring dan evaluasi keberlanjutan pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai total sebesar 86,69 melebihi syarat minimal 75,00, terdiri dari nilai komponen pengungkit sebesar 51,07 dan komponen hasil sebesar 35,62.
 - b. Nilai komponen pengungkit sebesar 51,07 telah memenuhi syarat nilai minimal sebesar 40,00;
 - c. Bobot nilai 6 (enam) area pengungkit seluruhnya memenuhi syarat minimal persentase 60% yaitu pada komponen Manajemen Perubahan dengan perolehan 75,00%, Penataan Tatalaksana dengan perolehan 76,21%, Penataan Sistem Manajemen SDM dengan perolehan 92,08%, Penguatan Akuntabilitas dengan perolehan 100%, Penguatan Pengawasan sebesar 82,93%, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 80,88%.
 - d. Penyampaian hasil *assesment* mandiri oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dalam Nota Dinas Nomor 3571/DJPDSPKP.1/OT.710/IX/2025 tanggal 22 September 2025 dari Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP berdasarkan hasil monev oleh Tim Penilai Mandiri.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
WBK
UNIT KERJA: DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Ara Perilaku	Jumlah Pertanyaan	Rebut	Pemenuhan	Reform	Nilai	Pemenuhan	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNCI		40,00					
1. MANAJEMEN PENGUNCIAN	16 (12 Pemenuhan dan 4 Reform)	8,00	4,00	3,00	6,00	75,00%	OK
2. PENYALAN TATAKALASANA	19 (9 Pemenuhan dan 9 Reform)	7,00	3,25	3,00	5,25	75,00%	OK
3. PENYALAN SISTEM MANAJEMEN BOM APARATUR	21 (18 Pemenuhan dan 3 Reform)	10,00	4,50	4,25	9,25	92,86%	OK
4. PENGUNCIAN AKUNTABILITAS	14 (11 Pemenuhan dan 3 Reform)	10,00	5,00	5,00	10,00	100,00%	OK
5. PENGUNCIAN PENGAWASAN	22 (18 Pemenuhan dan 4 Reform)	10,00	5,50	5,88	12,44	85,59%	OK
6. PENGUNCIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	22 (19 Pemenuhan dan 3 Reform)	10,00	3,50	4,16	8,09	80,89%	OK
TOTAL PENGUNCI	102 (79 Pemenuhan dan 23 Reform)				41,07	80,13%	OK
B. MARS		40,00					
1. REFORMASI TARIK BERKUTU DAN AKUNTABILITAS		19,00			19,00	89,47%	OK
a. Nilai Survey Persepsi Koneksi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)		17,50			16,80	96,00%	OK
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja		5,00			3,50	50,00%	OK
2. PELAYANAN PUBLIK TARIK PRIMA		17,00			16,83	98,98%	OK
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)		17,00			16,32	95,95%	OK
TOTAL MARS					35,83	89,58%	OK
Nilai Evaluasi Zona Integritas					66,89		OK

Jakarta, 17 September 2020

Ketua Tim Penilaian Pembangunan 22 Menu WBK dan WBKM
pada Direktorat Pemberdayaan Usaha


Jemaludin, S.P., M.B.

Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas

1. Hadi Kahandran
2. Dian Lestari Nugroho
3. Eriwan Triyanto
4. Rizki Dwi Prasetyo
5. Widya Chandra Purnama
6. Aida Fitriyanti
7. Helen Gusman
8. Alex Satrianus Gentyarto
9. Melita Khairunnisa
10. Yudi Prasetyo Nugroho
11. Yanti Yulianti
12. Rizki Apolita Gunadi

Gambar 29. Hasil Penilaian Wilayah Bebas Korupsi

IK6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan rewiu laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerja KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan

Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Hasil penilaian mandiri terhadap SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 memperoleh nilai A (Memuaskan), dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja dengan nilai 25,80;
- Pengukuran kinerja dengan nilai 24,60;
- Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,80; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 22,50

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pemasaran pada Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi s.d 2025* (7)	Persentase Realisasi s.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	2025*	86	86.70	100.81	86	86.70	100.81
	2024	75	75	100.00			
	2023	75	83.30	111,06.24			
	2022	-	-				
	2021	-	-				

Capaian indikator nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah 86,7 atau setara dengan 100,81% terhadap target tahun 2025 yakni 86. Capaian tersebut setara dengan 100,81% dari target RPJMN sebesar 86. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 75 maka realisasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 15,60%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 83,30 maka realisasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,085. Capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2021 karena tidak termasuk dalam IKK pada tahun tersebut.

Berdasarkan Memorandum Nomor 2495/DJPDSPPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP 2025 untuk Capaian Indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha yang dinilai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan TUNTAS dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan penilaian tim akuntabilitas.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Penginputan perencanaan kinerja tahun anggaran 2025 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada aplikasi *esr.menpan.go.id* tanggal 16 September 2025 di RR Karaginan GMB3.



Gambar 30. Penginputan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

- 2) Penginputan capaian kinerja triwulan III 2025 di SAPK tanggal 9 Oktober 2025 di RR.Setditjen PDSPKP Lt 14, GMB 3.



Gambar 31. Penginputan Capaian Kinerja Triwulan III 2025



Gambar 32. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dan Rincian Output Prioritas Lingkup Ditjen PDSPKP

3) Monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah serta Rincian Output (RO) Prioritas Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 17 Desember 2025 di RR. Setditjen PDSPKP Lt 14, GMB 3.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP lingkup Ditjen PDSPKP 2025

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Setdit	Dit. Logistik	Dit. Pemasaran	Dit. Pengolahan	Dit. PU	BBP3KP
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,00	23,00	22,50	23,00	22,50	23,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	87,20	87,20	86,70	87,20	86,70	87,20
	Predikat Penilaian		A	A	A	A	A	A

Gambar 33. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP

IK7. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		Persentase Realisasi terhadap target 2025
	TW IV 2025	TW IV 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	s.d TW II 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	87	87	89,52	92,05	89,52	102,89	100,77	100,77

Pada triwulan II tahun 2025, capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah 89,52. Capaian ini setara dengan 102,89% terhadap target triwulan IV tahun 2025 yakni 87. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87, maka capaian IP ASN lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha mampu mempertahankan dengan baik dengan capaian 119,36%.

IK8. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		Persentase Realisasi terhadap target 2025
	TW IV 2025	TW IV 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	Tahun 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	1	1	1	2	2	-	200	200	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Capaian realisasi untuk Indikator kinerja ini adalah 2 inovasi atau setara dengan 200%. Adapun inovasi yang diikutsertakan dalam penilaian SINOVIK adalah :

1. Inovasi “IKAN KU” – Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Berbasis Komunal
2. Inovasi “Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan VERSI SAT SET” – Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan dengan Verifikasi dan Evaluasi Secara Akurat, Transparan dan Cepat.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional 2025-2029 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Direktorat Pemberdayaan Usaha selama tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program seperti upaya pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akses pembiayaan, pemetaan dan promosi investasi, pengembangan kewirauhaan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan dimana merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap sumber daya produksi serta mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Meskipun berbagai pencapaian positif telah diraih, kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, maupun dinamika ekonomi global yang memengaruhi sektor kelautan dan perikanan nasional. Oleh karena itu, hasil evaluasi dari laporan ini akan menjadi landasan penting dalam perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, guna memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

4.2 Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Sosialisasi perizinan berusaha;
2. Pendampingan investasi kepada calon investor.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

4.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan III 2025, sebagai berikut:

Tabel 19. Tabel Tindak lanjut yang Telah Dilaksanakan Pada Triwulan III 2025

No	Rekomendasi Triwulan III 2025	Tindak Lanjut Pada Triwulan IV 2025
1	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait perizinan berusaha;	1. telah dilakukan fasilitasi perizinan melalui online maupun offline melalui OSS 2. telah dilakukan kegiatan Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan
2	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan	Telah dilaksanakan kegiatan : 1. <i>Investment and Business Matching 2025</i>. Kegiatan dilaksanakan di Ballroom GMB III KKP, dibuka oleh Sekretaris Jenderal KKP dan dihadiri oleh 351 peserta secara luring dan 1.395 peserta daring, antara lain perwakilan

		kedutaan besar negara mitra, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, asosiasi, perusahaan KP, pengelola kawasan industri, investor, dan NGO. 2. Pendampingan Rencana Investasi PT Panen Laut Lestari pada tanggal 20 November 2025 di Ruang Ballroom KKP GMB III. 3. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dengan Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik pada tanggal 13 Oktober 2025 4. Pembelajaran Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Wilayah NTT pada tanggal 22 Oktober 2025
3	Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.	telah dilaksanakan rapat koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan triwulan III pada tanggal Oktober 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Catur Sarwanto
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : Tornanda Syaifullah
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Tornanda Syaifullah

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha


Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	13,11
		2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat)	50
2.	Meningkatnya Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)	5
		4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)	6
		5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81
		11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
Total Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	12.619.000.000

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Tornanda Syaifullah

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha


Catur Sarwanto

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
 Nomor 247/DJPDSPKP/3/1U/140/I/2026

Yth. : Pjt. Direktur Jenderal PDSPKP
 Dari : Direktorat Pemberdayaan Usaha
 Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II, Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025
 Lampiran : Satu berkas
 Tanggal : 12 Januari 2026

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Usaha serta Laporan Kinerja (terlampir) yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)

Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan merupakan nilai total realisasi penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan, pemasaran, pemrosesan/pengolahan, dan jasa perikanan, yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kredit Investasi (KI) pada tahun 2025.

Realisasi Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai **Rp10,83 Triliun** yang terdiri dari PMA sebesar Rp2,71 triliun, PMDN Rp5,40 triliun dan KI Rp2,73 triliun. Capaian tersebut setara dengan 82,60% dari target tahun 2025 sebesar Rp13,11 triliun.

Faktor penghambat tidak tercapainya investasi sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain dipengaruhi oleh:

- dinamika perekonomian global tahun 2025 yang masih diwarnai ketidakpastian, perlambatan pertumbuhan ekonomi global (diproyeksikan sebesar 3,2% oleh IMF), serta penerapan kebijakan moneter yang relatif ketat.
- kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, diantaranya penerapan tarif impor yang tinggi, kasus Cesium 137 pada udang asal Indonesia, serta kewajiban alat penangkapan pada jenis ikan tertentu, khususnya rajungan.
- ketidakpastian perdagangan global yang berdampak pada penurunan minat investasi akibat menurunnya permintaan ekspor untuk produk/komoditas tertentu, meningkatnya biaya produksi, terketaknya profitabilitas, serta meningkatnya volatilitas pasar.
- ketidakpastian kebijakan domestik yang mendukung calon investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang diperoleh BBP3KP sebesar 86,69. Nilai tersebut terdiri dari nilai Komponen Pengungkit 51,07 dan nilai Komponen Hasil 35,62.

5. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Realisasi Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, pada tahun 2025 sebanyak 2 inovasi atau setara dengan 200% dari target yakni 1 inovasi. Inovasi tersebut adalah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Versi SatSet dan Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Berbasis Komunal (IKANKU). Kedua inovasi tersebut telah diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai informasi untuk inovasi IKANKU mendapatkan penghargaan sebagai Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP tahun 2025.

6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Realisasi nilai penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 sebesar 86,70 atau setara dengan 100,81% dari target sebesar 86. Nilai ini didapatkan dari hasil penilaian tim akuntabilitas lingkup Ditjen PDSPKP yang disampaikan melalui Memorandum Nomor 2495/DJPDSPKP/1/1U/210/VI/2025.

7. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 sebesar 89,52 atau setara dengan 110,52% dari target sebesar 87. Nilai ini didapatkan dari hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup Ditjen PDSPKP yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 53/DJPDSPKP/1/1U/140/I/2026.

8. Realisasi Pengelolaan Anggaran

Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 12.619.000.000,- dengan anggaran terblokir dan efisiensi sebesar Rp. 10.796.253.000,- sehingga anggaran efektif yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar Rp. 1.822.747.000,-.

Jumlah **realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha** pada tahun 2025 sebesar **Rp. 1.822.498.624,-** atau setara dengan 99,98% dari Pagu Efektif sebesar Rp. 1.822.747.000,-.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan
 Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kondisi tersebut mendorong sikap kehati-hatian calon investor, terutama PMA, yang menyebabkan penundaan ekspansi usaha, serta memicu kecenderungan reshoring investasi sehingga mengurangi aliran penanaman modal asing ke negara lain, termasuk Indonesia, dan mengarahkan investor untuk memilih instrumen yang lebih aman. Meskipun demikian, sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang baik, terjamin dan kontribusi investasi yang relatif stabil, terutama bersumber dari PMDN sebesar 115,22% dari tahun 2024, adapun KI mencapai 89,14% dan total investasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 87,72% dari capaian tahun sebelumnya.

2. Persentase Umkm Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkatkan omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina.

Jumlah Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas pada tahun 2025 sebesar 6,49% dengan kata lain terdapat 42 UMKM yang meningkat omsetnya dari 647 UMKM yang terkurus. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 5% maka realisasi persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas mencapai 120,00%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya.

Peningkatan tersebut didorong oleh membayanya ekosistem usaha pengolahan hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar, yang diperkuat oleh intervensi pemerintah berupa fasilitasi pendampingan manajemen usaha, perluasan jejaring pemasaran, peningkatan SDM, dukungan pembiayaan dan kemitraan usaha, serta proses kurasi UMKM yang lebih selektif, turut mendorong kemampuan UMKM dalam melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan omzet.

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Nilai realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 sebesar **99,22%** atau setara dengan 104,44% dari target sebesar 95%. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektur Jenderal tahun 2025 yang telah diselesaikan secara Tuntas.

4. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Nilai realisasi yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, pada tahun 2025 sebesar 86,69 atau setara dengan 115,59% dari target sebesar 75. Nilai tersebut diperoleh hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Mandiri pada tanggal 19 – 20 Agustus 2025 dengan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri (Permenn) PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, dengan hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1.
 Surat Nomor : 247/DJPDSPKP/3/1U/140/I/2026
 Tanggal : 12 Januari 2026

GAMBAR TANGKAP LAYAR CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA DALAM APLIKASI KINERJALU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3

Evaluasi Rencana Aksi Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV 2025

RENCANA AKSI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2025																															
SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	REALISASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA												REALISASI OUTPUT BERKALA												Pemasalahan	Rekomendasi
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Meningkatnya investasi kegiatan dan pekerjaan		52.492	52.492																												
1 Nilai Investasi Kegiatan dan Pekerjaan	Penyaliran pinjaman bersubsidi sub sektor kesehatan dan penanganan	52.492	52.492	20	Bulan tahun	1	2	4	5	6	8	12	12	16	18	19	20	-	-	4	5	6	8	12	12	16	18	19	21		
Meningkatnya Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan		1.332.808	1.213.345																												
2 Peningkatan Peningkatan Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Perumputan dan Perikanan Wirausaha KP	1.066.728	964.808	875	UMKM	-	25	55	65	75	85	95	105	115	125	130	137	-	25	55	65	75	85	95	105	115	125	130	137		
	Peningkatan kapasitas Lembaga usaha KP	123.348	123.322	22	Lembaga	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6		
	Penyaliran Lirisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program dan Kreditan Usaha	71.876	71.816	307	UMKM	-	10	20	23	26	30	35	40	45	50	52	56	-	10	27	27	27	32	37	40	47	50	52	56		
	Kurasi Produk Kelautan Perikanan	69.056	62.480	50	UMKM	-	-	-	-	-	44	45	46	47	48	49	50	-	-	-	-	-	44	45	46	47	48	49	50		
Tidak adanya laporan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha																															
6 Peningkatan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pendampingan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			4	Laporan	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4		
7 Peningkatan Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemenuhan dokumen tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
8 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk pemenuhan Prinsip Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemenuhan dokumen untuk pemenuhan Prinsip Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
9 Nilai Pemenuhan Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemenuhan dokumen Pemenuhan Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
10 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			2	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2		
11 Indeks Pelayanan Publik yang Diungkap pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	Penyampaian Indeks Pelayanan Publik yang Diungkap pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			



Jakarta, 12 Januari 2025

Direktorat Pemberdayaan Usaha

Ditandatangani

Secara Elektronik

Capa

Secara

Jakarta, 12 Januari 2026
Direktur Pemberdayaan Usaha

 Ditandatangani
Secara Elektronik
Catur Sarwanto